

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI

Oleh:

Putri Ramadhani I'madul Bilad

NIM 17230021



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI

Oleh:

Putri Ramadhani I'madul Bilad

NIM 17230021



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah Subhanahu Wa Ta'ala

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG


NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai pra-syarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Lumajang, 18 November 2021

Peneliti,



Putri Ramadhani I'madul Bilad

NIM 17230021

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mengoreksi, menelaah dan memberi masukan atas skripsi saudara Putri Ramadhani I'madul Bilad NIM 17230021, Mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (*Siyasah*),

Malang, 07 November 2021

Dosen Pembimbing,

Musleh Harry, SH., M.Hum
NIP 19680710 199903 1 002


Nur Jammami, S.HI., M.H
NIP 19811008 201503 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Putri Ramadhani I'madul Bilad, NIM 17230021, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019

Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 07 November 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

A blue circular official stamp of the Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Faculty of Syariah. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA', 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG', and 'FAKULTAS SYARIAH REPUBLIK INDONESIA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'Dr. Sudirman, M.A.' and the NIM number 'NIM. 197708222005011003' are printed.

MOTTO

*“Rasa bersalahmu tidak akan mengubah masa lalumu.
Kekhawatiranmu tidak akan mengubah masa depanmu”*

(Sahabat Ali Bin Abi Thalib)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, rasa terima kasih penulis ucapkan karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam yang telah menjadi cahaya terang bagi kita semua. Dan berkah keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris., M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Musleh Harry, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Nur Jannani, S. HI., MH, selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu dan tenaga untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. M. Aunul Hakim., S. Ag., M.H, selaku Dosen Wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih peneliti sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Kepada Ibu Ainul Churriyyah, Bapak Yusar Kuswanto serta Bapak M. Chozinul Asror selaku orangtua peneliti yang telah mendoakan segala kebaikan kepada peneliti. Peneliti ucapkan terimakasih dan maaf terutama disaat-saat peneliti merasakan sedih, rapuh atau keadaan sedang memburuk.
7. Kepada keluarga, peneliti ucapkan terimakasih atas semangat hingga kritikan agar semakin bersemangat untuk mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
8. Kepada sahabat yang telah menemani peneliti untuk menyelesaikan skripsi bersama yakni Mimi Sri Nuryani, peneliti ucapkan terimakasih dan maaf karena telah banyak merepotkan, membantu serta mendukung peneliti ketika terpuruk.
9. Kepada sahabat yang telah menemani peneliti selama 4 tahun perkuliahan yakni Septiani, Mardhatilla Khairina, Nirmala dan Salsabila Yustisya Amarin, peneliti ucapkan terimakasih dan maaf karena banyaknya kesalahan/khilaf yang peneliti

lakukan, namun tetap mendukung, menyemangati, menghibur dan mengisi waktu-waktu kuliah peneliti dengan canda tawa.

10. Kepada sahabat peneliti sejak menempuh MA yakni Siti Imroatul Masruroh, Teuku Malinda Rahmi, Nur Iftitah Rahma, dan Zanna Afinatus Zahro, peneliti ucapkan terimakasih dan maaf atas kesalahan serta khilaf yang peneliti buat, namun tetap menghibur, mendukung, memotivasi, menemani serta membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
11. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran kepada kami. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
12. Segenap staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan ini.
13. Serta seluruh pihak terkait yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, disampaikan terimakasih. *Jazakumullah Ahsanal Jaza'*.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, semoga ilmu yang telah penulis torehkan dapat bermanfaat baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah lepas dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf, kritikan serta saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 09 Agustus 2021

Peneliti,

Putri Ramadhani I'madul Bilad

NIM 17230021

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar nasional ataupun internasional. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi EYD plus, yakni transliterasi yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, Nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987, seperti yang tertera dalam Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ل = Tidak dilambangkan	ض = dl
------------------------	--------

ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghapus keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun, apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Tiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li-al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misal **في رحمة الله** menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (**ال**) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *MasyaAllah kânâ wa mâ lam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء - syaiun أمرت - umirtu
 النوعون - an-nauun تأخذون - ta' khudzûna

G. Penulisan Kata Arab dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al Qur'ân*), *Sunnah*, *Khusus*, dan *Umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

Al-‘Ibârât bi ‘umûm al-lafzh lâ bi khusûsh al-sabab

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
الملخص	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknis Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum	43
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	74
C. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif <i>Maqashid</i> <i>Syari'ah</i>	122
BAB V PENUTUP.....	135
A. KESIMPULAN	135
B. SARAN.....	135
DAFTAR PUSTAKA.....	137
LAMPIRAN GAMBAR	145

ABSTRAK

Putri Ramadhani, I'madul Bilad. (17230021) 2021. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Maqashid Syari'ah*, Skripsi. Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Nur Jannani, S.HI, MH.

Kata Kunci : Implementasi; Kawasan Tanpa Rokok; *Maqashid Syari'ah*

Berdasarkan kesehatan, penggunaan rokok dapat merusak kesehatan. Dalam perspektif agama Islam pun demikian, terutama dari perspektif *Maqashid Syari'ah*. Dengan mewujudkannya suatu peraturan, diharapkan kedepannya mampu mengatur penggunaan rokok sedikit berkurang dari sebelumnya dan lebih kondusif agar terwujud kenyamanan bersama. Mampukah dengan dibentuknya suatu peraturan daerah ini dapat mewujudkan kenyamanan bersama di masyarakat Kabupaten Lumajang atau tidak memberikan perubahan sama sekali.

Pada metode penelitiannya memakai metode yuridis-empiris. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis serta menggunakan data primer dan data sekunder berupa observasi, wawancara serta dokumentasi. Dalam penggunaan analisis datanya menggunakan teknik kualitatif-deskriptif.

Dari penelitian yang telah dilaksanakan terdapat beberapa temuan yakni: *pertama*, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Fakta yang ditemukan adalah beberapa tempat kawasan tanpa rokok belum mewujudkan peraturan secara menyeluruh. Bahkan beberapa tempat sama sekali tidak mewujudkan kawasan tanpa rokok dengan baik; *kedua*, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Maqashid Syari'ah*. Fakta yang ditemukan adalah peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang belum efektif dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok serta nilai *Maqashid Syari'ah* belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat luas.

ABSTRACT

Putri Ramadhani I'madul Bilad. (17230021) 2021. Implementation of Lumajang Regency Regional Regulation Number 5 of 2019 concerning the Perspective of Maqashid Syari'ah Non-Smoking Areas, Thesis. Constitutional Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Nur Jannani, S.HI, MH.

Keywords : Implementation, Non-Smoking Area, Maqashid Syari'ah

Based on health, the use of cigarettes can damage health. In the perspective of Islam, especially from the Maqashid Shari'ah's perspective. By realizing a regulation, it's hoped to regulate the use of cigarettes slightly less than before and more conducive to releasing mutual comfort. Can the establishment of regional regulations create convenience in the people of Lumajang Regency or not make any changes at all?

The research method uses the juridical-empirical method. By using a juridical-sociological approach and using primary data and secondary data in the form of observations, interviews, and documentations. In the use of data analysis using qualitative-descriptive techniques.

From the research that has been already implementing, there are several findings, namely: first, the implementation of the Lumajang Regency Regional Regulation Number 5 of 2019 concerning Non-Smoking Areas. The fact found is that some smoke-free areas have not fully realized the regulations as a whole. Some places don't have a no-smoking space at all; second, the implementation of Lumajang Regency Regulation Number 5 of 2019 concerning Non-Smoking Areas from the Maqashid Syari'ah Perspective. The facts found are that the role of the Lumajang Regency Government has not been effective in implementing a smoke-free area. So, the value of Maqashid Syari'ah has not been delivering to the public.

الملخص

فوتري رمضاني ، إعماد البلاد. (17230021) 2021. تنفيذ اللائحة الإقليمية
مديرية لوماجانج رقم 5 لسنة 2019 بشأن المناطق غير المسموح فيها بالتدخين
من منظور مقاصد الشريعة ، الأطروحة. القانون الدستوري ، كلية الشريعة ،
جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة: نور جناني، الماجستير

الكلمات الدالة: التنفيذ ، المنطقة الخالية من التدخين ، مقاصد الشريعة.

بناءً على الصحة، يمكن أن يؤدي استخدام السجائر إلى الإضرار بالصحة. من
منظور الإسلام أيضًا ، لا سيما من منظور مقاصد الشريعة. من خلال تحقيق اللائحة، من
المأمول أن تكون قادرة في المستقبل على تنظيم استخدام السجائر بشكل أقل قليلاً من ذي
قبل وأكثر ملاءمة لتحقيق الراحة الاجتماعية. هل يمكن أن يؤدي إنشاء اللائحة الإقليمية
إلى جعل الراحة الاجتماعية بين سكان لوماجانج أو عدم إجراء أي تغييرات على الإطلاق.
أما في منهج البحث استخدمت الباحثة المنهج القانوني التجريبي. باستخدام
المنهج القانوني الاجتماعي واستخدام البيانات الأولية والبيانات الثانوية في شكل الملاحظة
والمقابلة والتوثيق. في استخدام تحليل البيانات باستخدام التقنيات الوصفية النوعية
من البحث الذي تم إجراؤه، هناك العديد من النتائج، وهي: أولاً ، تنفيذ اللائحة
الإقليمية مديرية لوماجانج رقم 5 لعام 2019 بشأن المناطق الخالية من التدخين. الحقيقة
التي تم العثور عليها هي أن العديد من المناطق الخالية من التدخين لم تحقق المنطقة الخالية
من التدخين شاملاً. بعض الأماكن لم تحققها حتى في المنطقة الممنوع فيها التدخين على
الإطلاق ؛ ثانيًا ، تنفيذ اللائحة الإقليمية مديرية لوماجانج رقم 5 لعام 2019 بشأن

المنطقة الممنوع فيها التدخين في منظور مقاصد الشريعة. الحقائق التي تم العثور عليها هي أن دور حكومة مديرية لوماجانج لم يكن فعالاً في تنفيذ المنطقة الخالية من التدخين ولم يتم نقل قيمة مقاصد الشريعة بشكل صحيح إلى المجتمع الأوسع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan merokok ialah suatu kebiasaan dilakukan untuk menghisap batang rokok, dikerjakan setiap hari serta menjadi suatu kebutuhan yang sulit dihindari bagi mereka yang telah kecanduan. Didalam kandungan sepuntung rokok terdapat kandungan nikotin yang menyebabkan ketergantungan bagi pemakainya. Diketahui bahwa dalam waktu tujuh detik nikotin akan mencapai ke otak setelah seseorang menghirup asap rokok atau menghisap rokok.¹

Banyak perokok yang menyimpulkan bahwa merokok menjadi hak asasi manusia yang perlu dijaga dan tidak bisa dilarang. Hal ini terwujud dari banyaknya dari mereka untuk meminta diberikannya fasilitas pengadaan ruang rokok di tempat umum, atau bahkan kebebasan merokok sesuai keinginan mereka. Hal ini justru membahayakan kesehatan sesama manusia maupun lingkungan sekitar.²

Dalam Pasal 28A hingga 28I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan mengenai hak asasi manusia. Yang dimaksud dalam hak asasi

¹ Soetjiningih, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*, (Jakarta: Sagung Seto, 2010), 191

² Fitri Syarifah, "Benarkah Merokok Itu Hak Asasi Manusia?", *Liputan6*, 27 Agustus 2014, diakses 6 Desember 2020, <https://www.liputan6.com/health/read/2096872/benarkah-merokok-itu-hak-asasi-manusia>

manusia diatas ialah hak untuk mendapatkan kesehatan dan terwujud pada bentuk konstitusi.

Sayangnya, anggapan masyarakat pun berbeda. Dimana mereka menganggap bahwa merokok menjadi hak asasi manusia. Seorang Hakim bernama Sorimuda Pohan, seorang mantan anggota DPR Periode Tahun 2004-2009 mengatakan dalam Sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa kebiasaan merokok yang dilakukan masyarakat adalah kebutuhan individual, bukan bentuk dari hak asasi manusia.³

Sebelumnya, peneliti sempat melakukan penelitian di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. Masih ditemukan banyak pelanggaran, dimana para Aparatur Sipil Negara masih melakukan kegiatan merokok didalam gedung tepatnya di pojok ruangan. Hal ini berbanding terbalik dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan, yang seharusnya penertiban dilakukan sebaik-baiknya. Disini Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang telah menyediakan tempat khusus bagi perokok yakni diluar gedung dekat dengan tempat parkir. Setelah melakukan wawancara dengan Plt. Kasubag Hukum Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Fira Yofiana menyebutkan bahwa tempat khusus tersebut sempat digunakan pada awal penetapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini.

³ Hukumonline, "Merokok Dinilai Bukan Bagian dari HAM", *Hukumonline.com*, 06 Januari 2011, diakses 21 Oktober 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d2515c41772e/merokok-dinilai-bukan-bagian-dari-ham-/>

Setelah beberapa bulan, para pegawai tetap merokok didalam gedung yakni di pojok ruangan, hingga dibawah tangga tempat lalu lalang banyak orang.⁴ Kegiatan tersebut bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang menyebutkan bahwa Kawasan Tanpa Rokok sesuai dalam Pasal 5 huruf g dan huruf h yang menyebutkan bahwa wajib untuk menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Selain dari Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, masih banyak ditemukan pelanggaran di tempat Kawasan Tanpa Rokok lainnya seperti di Angkutan Umum, Pusat Belanja, Kantor Dinas/Badan, hingga Rumah Sakit. Hal ini bukan dikarenakan tidak ada rambu atau tanda dilarang merokok. Namun, masyarakat yang masih belum sadar seberapa bahaya dari asap rokok untuk kesehatan fisik diri sendiri, orang lain serta lingkungan, sehingga belum bisa mengontrol diri sendiri agar tidak merokok. Selain itu, penegakan hukum yang jauh dari kata maksimal menambah satu alasan lagi mengapa di kawasan tanpa rokok tersebut masih banyak terjadi pelanggaran.

Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok menyebutkan bahwa tempat

⁴ Fira Yofiana, wawancara, (Lumajang, 23 November 2020)

husus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan, yakni sebagai berikut:⁵

- a. Merupakan ruang terbuka, ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar, atau ruang yang dilengkapi alat penghisap udara, sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
- c. Jauh dari pintu masuk dan keluar;
- d. Jauh dari tempat orang lalu lalang; dan
- e. Disediakan tempat puntung rokok berikut peringatan bahaya rokok.

Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok menjelaskan bahwa Pimpinan atau Penanggungjawab yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi berupa: a. teguran lisan; dan b. teguran tertulis. Pada Pasal 15 Ayat (3) menjelaskan bahwa dalam hal pimpinan atau penanggungjawab yang dimaksud pada ayat (2) adalah PNS/Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) maka sanksi dijatuhkan tunduk pada Peraturan Perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai.⁶

⁵ Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok

⁶ Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Namun, melihat masih banyaknya pegawai yang melanggar tentu bisa dibuktikan bahwa pasal ini tidak berjalan dengan baik.

Dikarenakan masih banyak hal yang perlu diteliti, dari sini peneliti berinisiatif untuk mengangkat isu ini sebagai judul penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Maqashid Syari’ah*” untuk mampu menemukan hal terkait bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok serta bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Maqashid Al-Syari’ah*.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok masih belum berjalan optimal, terlihat masih ditemukannya pelanggaran dalam beberapa tempat yang masuk dalam lingkup Kawasan Tanpa Rokok. Dengan ini, pembahasan penelitian akan dilanjutkan terbatas pada peraturan daerah yang dimaksud.

C. Rumusan Masalah

Menyesuaikan uraian pembuka yang disampaikan sebelumnya pada Latar Belakang, selanjutnya peneliti akan menyebutkan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?
2. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan bertujuan memberikan manfaat serta berkontribusi dalam bidang keilmuan, yaitu:

1. Penelitian dilakukan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
2. Penelitian dilakukan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Maqashid Syariah*.
3. Penelitian dilakukan untuk menganalisis dan menghimbau terkait hambatan jalannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 agar poin-poin pentingnya dapat diwujudkan dengan baik dikemudian hari.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian akan dinilai baik bila memberikan manfaat teoritis ataupun praktis bagi pembacanya. Adapun manfaatnya berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengharapkan hasil penelitian bisa menjadi suatu referensi untuk pembaca agar mengetahui landasan hukum sebagai acuan untuk menegakkan peraturan, terlebih tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- b. Mengharapkan hasil penelitian menjadi acuan agar nantinya lebih dikembangkan lagi oleh para peneliti lain dengan menggunakan bahasan serupa di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengharapkan hasil penelitian menjadi kritikan serta tamparan atas kebijakan yang ada dan para aparat penegak hukum yang berkecimpung pada ranah dalam pembahasan penelitian yang belum menjalankan poin-poin penting dalam peraturan daerah yang dimaksud.
- b. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan bagi Aparat Penegak Hukum, Pemerintah dan masyarakat agar semakin menegakkan hukum yang belum maksimal dijalankan.

F. Definisi Operasional

Agar memperoleh bentuk gambaran umum terkait penelitian ini sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman, maka diberikan beberapa definisi operasional, diantaranya sebagai berikut:

1. **Implementasi:** Pelaksanaan; penerapan (pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk—tentang hal yang disepakati dulu.⁷
2. **Peraturan Daerah:** Peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat dengan dasar Undang-Undang atau penjabaran dari perundang-undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan perundang-undangan yang lain berlaku dengan kepala daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah.⁸
3. **Kawasan Tanpa Rokok:** Ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.⁹
4. **Maqashid Syari'ah:** Makna dan tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.¹⁰ Singkatnya, *Maqashid Syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang diharapkan dari penetapan suatu hukum.¹¹

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁸ Soebono Wirjosoegito, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 14.

⁹ Pasal 1 Angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok

¹⁰ Ghofar Shidiq, "Teori *Maqashid al-Syari'ah* Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung* Vol. XLIV, No. 118, Juni-Agustus 2009, <https://media.neliti.com/media/publications/220106/>

¹¹ Ibid.

G. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan pembaca, maka Karya Tulis Ilmiah harus ditulis dengan sistematis, antara bab satu dan lainnya harus terdapat keselarasan. Sehingga, peneliti menjabarkan sistematika penulisan diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN memaparkan terkait latar belakang dari kekhasan dari penelitian kasus. Didalam bab ini rumusan masalah akan dipaparkan dan akan dijawab oleh peneliti dalam pembahasan nanti. Bab ini juga menjelaskan terkait tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, apa saja definisi operasionalnya serta bagaimana sistematika penulisannya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA menjelaskan penelitian yang telah ada sejak dulu atau sejak sebelumnya dengan menggunakan tema pembahasan yang serupa. Selain itu, penelitian mengemukakan persamaan serta perbedaan dari penelitian lain dengan pembahasan yang serupa. Selanjutnya, bab ini menjelaskan teori-teori yang dipakai sebagai dasar yuridis dalam pembahasan penelitian, dan teori digunakan sebagai analisis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN menjabarkan terkait cara yang dipergunakan untuk dilakukannya proses jalannya penelitian, dengan memperhatikan jenis penelitian, jenis pendekatan, sumber-sumber data yang diambil hingga bagaimana pengelolaan data yang telah diperoleh. Sangat diperlukan memilih metode penelitian yang benar dikarenakan dapat mempengaruhi bagaimana hasil dari penelitian itu.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN akan membedah, menganalisa serta membahas terkait kasus dari penelitian yang telah dilakukan. Pada Bab 4 menjelaskan kekhawatiran akademik pada rumusan masalah. Dari hasil tersebut, lalu diproses serta dianalisis memakai teori yang telah dipilih agar memudahkan dalam menganalisis.

BAB V PENUTUP berisi tentang kesimpulan terkait semua penelitian yang sudah terlaksana. Selain itu, menjawab pertanyaan yang telah dilontarkan masalah yang berada pada Bab I Pendahuluan serta saran ditujukan pada pihak yang dituju.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Demi membantu terbentuknya karya ilmiah yang mudah ditangkap, maka perlu penelaahan lebih lanjut sebelum menggunakan tema bahasan serupa. Hal ini dimaksud agar tidak timbul plagiasi, serta terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu agar dapat ditemukan persamaan dan perbedaan dasar dari penelitiannya:

1. Ade Retsy Ambar Wati, *Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2017.

Penelitian ini berasal dari skripsi dengan judul “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014” milik Ade Retsy Ambar Wati. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris agar mendapatkan data utama serta data tambahan¹² Dari penelitian Penerapan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok khususnya di Kantor Dinas Kesehatan Kota Metro dan

¹² Ade Retsy Ambar Wati, “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014”, (Undergraduate thesis, Universitas Lampung, 2017), <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/582213#:~:text=Penerapan%20Kawasan%20Tanpa%20Rokok%20merupakan,dinyatakan%20dilarang%20untuk%20kegiatan%20merokok.>

Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup serta Masjid Taqwa Kota Metro sudah berjalan baik dengan telah memasang stiker-stiker tentang Kawasan Tanpa Rokok di beberapa lingkungan sekitar. Penelitian oleh peneliti Ade Retsy Ambar Wati dengan judul “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014” memiliki perbedaan dengan milik peneliti, yakni pada objek penelitiannya. Sehingga peneliti masih bisa melanjutkan penelitian.

2. Lutfiya Purwantiningtias, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Studi Kasus Kawasan Terbatas Merokok di Samsat Surabaya Selatan)*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Penelitian berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Studi Kasus Kawasan Terbatas Merokok di Samsat Surabaya Selatan)” milik Lutfiya Purwantiningtias.¹³ Penelitian yang dimaksud memakai metode kualitatif dan jenis penelitian *case study*. Dari penelitian Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok telah terwujud.

¹³ Lutfiya Purwantiningtias, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Studi Kasus Kawasan Terbatas Merokok di Samsat Surabaya Selatan)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015), <http://digilib.uinsby.ac.id/2698/>

Namun, studi kasus kawasan terbatas merokok di Samsat Surabaya Selatan belum terlaksana dengan baik karena *Smoking Area* tidak berfungsi. Faktor pendukung implementasinya adalah upaya sosialisasi pada seluruh instansi pemerintah dan swasta di Surabaya. Dan faktor penghambatnya ialah tidak adanya sosialisasi terhadap masyarakat dan sikap tegas dalam menangani perokok di tempat yang bukan tempatnya. Dari penelitian terdahulu ini dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti Lutfiya Purwantiningtias dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Studi Kasus Kawasan Terbatas Merokok di Samsat Surabaya Selatan)” ini berbeda dengan milik peneliti. Baik dari segi metode penelitian, jenis penelitian dan objek penelitiannya. Sehingga peneliti dapat melanjutkan penelitian.

3. Amalia Lathifah, *Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Penelitian yang berasal dari skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok” milik Amalia Lathifah. Pada penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, bersifat deskriptif-analitik dan jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Hasil

dari penelitian ini adalah bahwa dalam pelaksanaannya, Peraturan Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok belum diimplementasikan secara efektif. Dari delapan kawasan yang ditetapkan baru tiga kawasan yang benar-benar menerapkan aturan kawasan tanpa rokok seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar serta kantor pemerintah.¹⁴ Dari penelitian milik peneliti Amaliah Lathifah ini dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok” ini berbeda dengan milik peneliti. Baik dari segi pendekatan penelitian, jenis penelitian dan objek penelitiannya. Sehingga peneliti dapat melanjutkan penelitian.

4. Saifullah, Muhammad Ikbil, dan Hartina, *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh Jawa Barat, 2019.

Penelitian ini berasal dari jurnal dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang” yang ditulis oleh Saifullah, Muhammad Ikbil, dan Hartina.

¹⁴ Amalia Lathifah, “Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30526/1/13370060_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kuantitatif serta jenis penelitiannya adalah eksperimen. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, kuisioner, wawancara dan studi kepustakaan. Dalam tahapan analisis data dimulai dengan tahapan persiapan, reduksi data dan tabulasi data serta untuk menilai jawaban responden yang digunakan Skala Guttman. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah pada rumusan pertama membuat tabel terkait faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan diantaranya tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi dan hasil kebijakan yang diakumulasikan nilainya sebesar 41% artinya masuk dalam kategori tidak terimplementasikan. Selain itu, pada rumusan kedua menjawab terkait seberapa besar faktor-faktor mempengaruhi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebesar 52% dari 100% hasil yang diharap termasuk dalam kategori berpengaruh.¹⁵

5. Lidya Rahmadani Hasibuan dan Salman Paris Harahap, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan*. Jurnal Hukum Responsif, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2019.

¹⁵ Saifullah, Muhammad Iqbal, dan Hartina, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh Jawa Barat*, 2019. <http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i1.1901>

Penelitian ini berasal dari judul jurnalnya yakni “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan” yang ditulis oleh Lidya Rahmadani Hasibuan dan Salman Paris Harahap. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data primer serta sekunder melalui wawancara, observasi hingga mencatat dokumen. Kemudian data tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Medan telah melakukan berbagaiusaha seperti sosialisasi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Bebas Rokok. SMA Pancabudi Medan ialah salah satu *stakeholder* dari Perda No. 3 Tahun 2014 telah berusaha menerapkan Kawasan Bebas Rokok di sekolah. Sedangkan kendala yang dihadapi ialah kurangnya personil dari aparaturn pemerintah sebagai pengawas, kurangnya sosialisasi perda dan kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang pentingnya tidak merokok di tempat umum.¹⁶

6. Nancy Purnamasari Setiawan, Denny Hernawan dan Euis Salbiah.
*Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 12 Tahun 2009
Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Pelaksanaan Kawasan*

¹⁶ Lidya Rahmadani Hasibuan dan Salman Paris Harahap, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan”, *Jurnal Hukum Responsif, Universitas Pembangunan Panca Budi*, 2019.
<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/494/466>

Tanpa Rokok pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Bogor). Jurnal Governisasi. Universitas Djuanda, 2017.

Penelitian ini berasal dari penelitian dengan judul yakni “Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Bogor)” yang ditulis oleh Nancy Purnamasari Setiawan, Denny Hernawan dan Euis Salbiah. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Dari hasil penelitian ini adalah “Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Bogor)” menghasilkan skor 3,50 yang memiliki arti bahwa penafsiran skor tersebut berada pada kategori baik. Skor tersebut berdasarkan pada rekapitulasi jawaban responden terhadap enam dimensi, diantaranya adalah dimensi efektivitas berada pada kategori baik, efisiensi berada pada kategori sedang, kecukupan berada pada kategori sedang, pemerataan berada pada kategori sedang, responsivitas berada pada kategori baik dan ketepatan berada pada kategori baik.¹⁷

¹⁷ Nancy Purnamasari Setiawan, Denny Hernawan dan Euis Salbiah, “Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Bogor)”, *Jurnal Governisasi*, Universitas Djuanda, 2017. <https://doi.org/10.30997/jgs.v3i1.809>

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Ade Retsy Ambar Wati	Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasar-kan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014	<p>a. Bagaimanakah Penerapan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014?</p> <p>b. Apakah faktor penghambat penerapan dari Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian memiliki kesamaan, dimana sama membahas terkait Kawasan Tanpa Rokok. - Sama-sama menganalisis dari kebijakan yang sama yakni Peraturan Daerah. - Memiliki kesamaan dalam meneliti mengenai bagaimana Implementasi Peraturan Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitan berbeda, dimana lokasinya terletak di kawasan Dinas Kesehatan Kota Metro, Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup dan RSUD Jend. Ahmad Yani Kota Metro. - Objek penelitian berbeda dengan melakukan penelitian terkait penerapan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014. - Rumusan Masalah yang ditanyakan terdapat perbedaan. Dimana milik peneliti memasukkan

					unsur islam dengan menggunakan teori <i>Maqashid Syari'ah</i> .
2	Lutfiya Purwantiningtias	Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Studi Kasus Kawasan Terbatas Merokok di Samsat Surabaya Selatan)	<p>a. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok?</p> <p>b. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Samsat Surabaya Selatan?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian memiliki kesamaan, dimana sama membahas terkait Kawasan Tanpa Rokok. - Sama-sama menganalisis dari kebijakan yang sama yakni Peraturan Daerah. - Memiliki kesamaan dalam meneliti terkait bagaimana implementasi Peraturan Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat perbedaan pendekatan, dimana disini memakai pendekatan kualitatif dan jenis penelitian <i>case study</i> sedangkan peneliti memakai pendekatan yuridis-sosiologis dan jenis penelitian yuridis-empiris. - Objek penelitian dari peneliti Lutfiya Purwantiningtias adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan

					<p>Terbatas Merokok dan Samsat Surabaya Selatan. Sedangkan milik peneliti adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.</p> <p>- Rumusan Masalahnya memiliki perbedaan dimana milik peneliti memasukkan unsur islam yakni dengan menggunakan teori <i>Maqashid Syari'ah</i>.</p>
3	Amalia Lathifah	Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	a. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif	<p>- Penelitian memiliki kesamaan, dimana membahas terkait Kawasan Tanpa Rokok.</p> <p>- Sama-sama menganalisis</p>	- Penelitian milik Amalia Lathifah bersifat deskriptif-analitik dan memakai jenis penelitian lapangan

			<p>Sistem Hukum, khususnya di Kawasan Malioboro dan Kantor Balaikota Yogyakarta?</p> <p>b. Bagaimana peran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan aturan Kawasan Tanpa Rokok Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>?</p>	<p>dari peraturan yakni Peraturan Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kesamaan dalam meneliti terkait bagaimana implementasi Peraturan Daerah. - Memiliki kesamaan dalam meneliti terkait bagaimana implementasi Peraturan Daerah. - Memiliki kesamaan dimana sama-sama menggunakan teori islam. 	<p>(<i>field research</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian milik peneliti Amalia Lathifah adalah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, UPT Malioboro, masyarakat Kawasan Malioboro serta pegawai di Kantor Balai Kota Yogyakarta. Sedangkan peneliti berfokus pada tempat-tempat Kawasan Tanpa Rokok, baik instansi hingga
--	--	--	---	---	--

					<p>masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki perbedaan dalam teori yang digunakan. Milik peneliti Amalia Lathifah menggunakan teori Fiqh Siyasah sedangkan milik peneliti adalah <i>Maqashid Syari'ah</i>.
4	Saifullah, Muhammad Iqbal, dan Hartina	Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang	<p>a. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang?</p> <p>b. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki tujuan penelitian yang sama dalam mencari bagaimana Implementasi suatu peraturan. - Menjadikan Rumah Sakit sebagai objek penelitian. - Mencaritahu faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi suatu peraturan. - Teknik pengumpulan data yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki perbedaan dalam peraturan yang diteliti. - Memiliki perbedaan dalam jenis penelitian serta pendekatannya.

			Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang?	digunakan sama yakni observasi, wawancara dan studi kepustakaan.	
5	Lidya Rahmadani Hasibuan dan Salman Paris Harahap	Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan	<p>a. Bagaimana Pengaturan Hukum Kawasan Bebas Rokok berdasarkan Konsep Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Medan No. 35 Tahun 2014?</p> <p>b. Bagaimana Implementasi Kawasan Bebas Rokok di Sekolah, Terminal Amplas, Kantor Walikota Medan dan DPRD Medan sebagai tempat yang dilindungi dalam Perda Kota Meda No. 3 Tahun 2014?</p>	<p>- Memiliki persamaan dalam teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi serta mencatat dokumen.</p> <p>- Memiliki persamaan dala melakukan observasi dan wawancara di sekolah, terminal dan kantor pemerintahan.</p> <p>- Memiliki persamaan dalam meninjau peraturan daerah.</p>	<p>- Memiliki perbedaan tempat objek penelitiannya.</p> <p>- Memiliki perbedaan metode penelitiannya.</p>
6	Nancy Purnamasari Setiawan, Denny Hernawan	Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bogor No.	a. Bagaimana evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Kota	- Memiliki persamaan dalam meninjau peraturan	- Memiliki perbedaan dalam hal apa yang akan dibahas,

	dan Euis Salbiah	12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Bogor).	Bogor No. 12 Tahun 2009 Tentag Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Bogor)?	daerah masing-masing. - Memiliki persamaan dalam teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan studi kepustakaan. - Sama-sama menjadikan sekolah sebagai objek penelitiannya.	dimana pada jurnal ini lebih berfokus untuk membahas hasil evaluasi dari perda kota bogor tentang kawasan tanpa rokok dengan didasarkan pada studi kasus pelaksanaan KTR pada sekolah menengah atas negeri. - Memiliki perbedaan dalam metode penelitiannya yakni kuantitatif. Sedangkan milik peneliti adalah kualitatif.
--	------------------	--	---	--	---

B. Kerangka Teori

a. Teori *Maqashid Al-Syari'ah*

Maqashid Al-Syari'ah gabungan kata *maqashid* dan *syari'ah*, kata *maqashid* berasal dari jama' kata *maqshad* dengan arti maksud dan tujuan,

lalu kata *syari'ah* memiliki arti hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ditetapkan agar menjadi pedoman manusia untuk tercapainya kebahagiaan didunia serta akhirat. Sehingga *Maqashid Al-Syari'ah* memiliki arti kumpulan sesuatu yang berharga dan diwujudkan dalam bentuk syari'at hukum.¹⁸ Singkatnya *Maqashid Al-Syari'ah* ialah suatu hal yang memiliki tujuan dan dicapai dalam penetapan suatu hukum.

Seorang pakar bernama Wahbah al-Zuhaili mengartikan *Maqashid Syari'ah* yakni hukum memelihara keberadaan keseluruhan suatu makna serta tujuan, hampir keseluruhan hukum ataupun tujuan akhir dari syari'at serta rahasia yang terdapat dalam hukum dan diletakkan oleh syara'.¹⁹

Teori *Maqashid Al-Syari'ah* dalam hukum Islam sangatlah perlu dibahas. Hal ini berasal dari adanya beberapa pendapat diantaranya adalah: *Pertama*, Hukum Islam ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan diperuntukkan kepada seluruh umat manusia, sehingga keberadaan hukum Islam akan mengikuti perubahan zaman serta sosial. *Kedua*, dari aspek historis, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam telah memberikan perhatian terhadap teori ini begitu pula sahabat, hingga generasi mujtahid. *Ketiga*, keilmuan terkait *Maqashid Al-Syari'ah* ialah menjadi keberhasilan utama para mujtahid ketika berijtihad, karenanya persoalan ketika melakukan kegiatan *mu'amalah* oleh manusia

¹⁸ Ghofar Shidiq, "Teori *Maqashid al-Syari'ah* Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118, Juni-Agustus 2009. <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>

¹⁹ Ibid.

dapat terselesaikan. Salah satu pakar ushul fiqh bernama Abdul Wahhab Khallaf menerangkan bahwa seseorang tidak dapat memahami dengan benar nash-nash syari'ah kecuali ia telah memahami *Maqashid Syari'ah* (tujuan hukum). Wahbah al-Zuhaili pun sependapat dengan hal ini, dan menyebutkan ilmu terkait *Maqashid Syari'ah* berbicara mengenai sesuatu yang *dharuri (urgent)* atau penting untuk para mujtahid. Hal ini dilakukan ketika akan mengerti nash serta menghasilkan *istinbath* hukum, sehingga orang awam menganggap hal ini adalah cara mengetahui rahasia syari'ah.²⁰

Seluruh kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan tentang perintah hingga larangan serta sunnah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam memiliki tujuan tertentu yang tidak ada kesia-siaan didalamnya. Bahkan dalam Al Qur'an surat Al Anbiya':107 dijelaskan tentang tujuan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, yakni:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam.”

(Qs. Al-Anbiya':107)

Ayat diatas menjelaskan maksud 'rahmat bagi seluruh alam' ialah kemaslahatan umat. Sehingga secara sederhana, maslahat ialah sesuatu hal

²⁰ Ibid.

yang bermanfaat serta dapat diterima logika manusia. ‘Diterima logika manusia’ ialah otak manusia yang mampu untuk mencerna, memahami dan mengetahui tujuan penetapan hukum yang dibentuk untuk kemaslahatan umat. Contoh lainnya ialah Allah Subhanahu Wa Ta’ala memerintahkan pada umat manusia agar berdzikir dan shalat, perintah ini termaktub dalam surat Al-Ra’d : 28 dan surat Al-‘Ankabut : 45, yakni sebagai berikut:²¹

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۚ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۚ

“Ketahuilah bahwa dengan berdzikir itu hati akan tentram.”

(Qs. Al-Ra’d : 28)

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.”

(Qs. Al-‘Ankabut : 45)

Meskipun begitu, juga terdapat hukum yang tidak bisa dijabarkan secara jelas dan syar’i oleh pembuat syari’at serta akal juga sulit berpikir rasional seperti terkait penetapan waktu dhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari. Namun, hal ini tidak menjadikan penetapan

²¹ Ibid.

hukum tidak memiliki tujuan, hanya saja akal manusia belum bisa menjangkaunya.²²

Kandungan dari *maqashid al-syari'ah* bersumber dari perkataan al-Syathibi yang merupakan tokoh pembaharu ushul fiqh. Beliau telah hidup pada abad ke-8 Hijriah, serta penjelasan terkait *maqashid al-syari'ah* tertulis dalam kitabnya yang berjudul *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Al Syathibi menerangkan terkait penetapan syari'at dilakukan demi kepentingan umat manusia di seluruh muka bumi baik dunia ataupun akhirat. Sehingga, syari'at dapat diketahui dibuat untuk mampu mewujudkan kebahagiaan individu serta seluruh umat, mampu menjalankan aturan hingga memenuhi dunia dengan keindahan serta kebaikan, dan membentuk generasi yang mulia bagi seluruh umat manusia, karena Islam adalah kerahmatan itu sendiri.²³

Maka penjabaran diatas menghasilkan pembahasan penting bagi *maqashid al-syari'ah* bahwa terdapat hikmah dan *illat* yang ditetapkan secara hukum. Kedua hal ini berbeda, dimana *illat* merupakan sifat tertentu yang jelas dapat diketahui secara objektif (*zahir*), terdapat tolak ukurnya (*mundhabit*), serta sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya sebagai penentu adanya hukum. Lalu hikmah ialah

²² Ibid.

²³ Ibid.

tujuan atau maksud dari pensyari'atan hukum dalam mewujudkan kepentingan manusia.²⁴

Seorang pakar ushul fiqh bernama An-Nabhani mengatakan berkali-kali dengan sangat hati-hati bahwasanya maslahat ialah hikmah atau hasil (*natijah*), tujuan (*ghayah*) serta akibat (*'aqibah*) dari adanya pensyari'atan hukum, bukan sebagai '*illat* atau motif (*al-ba'its*) dari pensyari'atan hukum. Hal ini dikarenakan dari segi bentuk (*shighat*), ayat-ayat yang ada tidak menunjukkan terdapat suatu '*illat* (*al 'illiyah*). Melainkan sifat *rahmat/maslahat* untuk menunjukkan hasil penerapan syariat, seperti ayat berikut:²⁵

وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

“Dan Kami turunkan dari Al Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang dhalim selain kerugian.”

(Qs. Al-Isra': 82)

An-Nabhani berpendapat bahwa ayat dalam QS. Al Isra' : 82 tidak terdapat *shighat ta'lil* (bentuk kata yang menunjukkan '*illat*) contohnya terdapat *lam ta'lil*. Yang dimaksud adalah diutusnya Rasulullah Shallahu

²⁴ Ibid.

²⁵ Sudirman Suparmin, “Peran Maqashid Syari'ah dalam Kehidupan”, *Al-Kaffah*, Vol.4, No.1, (2001): 3. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/2914>

‘Alaihi Wasallam bentuk hasil (*natijah*) ialah menjadi rahmat bagi seluruh alam, sehingga *rahmat/maslahat* ialah hasil dari dilaksanakannya suatu syariat, bukan ‘*illat* yaitu dari syari’at yang ditetapkan.²⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Maqashid Al-Syari’ah* ialah cara mengetahui hikmah dari syara’ Al Qur’an dan Hadis secara tersurat maupun tersirat dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah tetapkan. Kemudian, satu tujuan akhir hukum adalah masalah atau melakukan kebaikan untuk kemaslahatan serta kesejahteraan umat ketika bermu’amalah di dunia atau beribadah dan memperkuat ‘aqidah untuk di akhirat. Adapun hal yang perlu dicapai untuk kemaslahatan ialah manusia wajib mencukupi kebutuhan primernya (*dharuriat*), melengkapi kebutuhan sekundernya (*hajiyyat*) hingga kebutuhan tersiernya (*tahsiniat* atau *kamaliat*).²⁷

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Arti penelitian adalah upaya dalam mencari suatu jawaban yang benar dari suatu masalah dengan menggunakan akal serta didukung dengan adanya bukti nyata (fakta empirik).²⁸ Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris yaitu dengan memastikan perbuatan pemberlakuan hukum atau implementasi kepastian hukum normatif secara *inaction* berdasarkan kejadian tertentu yang telah terjadi di lingkungan masyarakat.²⁹ Dimana peneliti melaksanakan studi di lapangan untuk melihat, meninjau dan mengamati bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.³⁰

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti memakai pendekatan yuridis-sosiologis dengan mengelompokkan serta menggabungkan hukum sebagai institusi sosial yang riil yang berfungsi pada keberlangsungan hidup.³¹ Jenis pendekatan penelitian ini menekankan untuk mendapatkan keilmuan hukum dengan turun langsung

²⁸ Anonim, "Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan", Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 5. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/>

²⁹ Via Media, "Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur dan Korelasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta", (Undergraduate Thesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2008), http://eprints.undip.ac.id/17589/1/Via_Media

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 30.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

pada obyek penelitiannya yakni dengan mencari tahu bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di beberapa tempat dalam lingkup Kawasan Tanpa Rokok sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

C. Sumber Data

Pengertian sumber data ialah suatu keterangan atau bahan nyata yang mampu menjadi dasar dari suatu kajian analisis atau kesimpulan. Lofland (1984) dalam Moleong menyebutkan bahwa hal yang diutamakan dalam suatu penelitian kualitatif adalah perkataan dan perilaku ditambah adanya data lain yakni dokumen-dokumen pendukungnya.³² Penelitian yuridis-empiris sendiri membutuhkan sumber bahan hukum seperti berikut:

1. Data Primer

Pengertian Data Primer ialah sejumlah data diperoleh langsung dari yang bersangkutan dengan tidak lupa untuk mengamati dan mencatatnya.³³ Disini peneliti menggunakan data primer berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang

³² Novika Rismawan, “Kerjasama Pengelolaan Buah Swalayan di Desa Manunggal Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/244/7/08220040>

³³ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1986), 55.

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, wawancara kepada responden serta hasil dokumentasi yakni sebagai berikut:

- Hasil wawancara bersama responden:

a) Aparatur Sipil Negara :

- Fira Yofiana selaku Plt. Kasubag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.
- Dimas selaku pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lumajang.

b) Tenaga Kesehatan :

Intan Pratiwi selaku salah satu pegawai Laboratorium Klinik Jenggolo Lumajang.

c) Petugas Keamanan :

- Yatno selaku tukang parkir dan petugas keamanan Puskesmas Kecamatan Lumajang.
- Agus selaku petugas keamanan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang.
- Yono selaku petugas keamanan MAN Lumajang.
- Yadhi selaku petugas keamanan MTsN Lumajang.
- Roni selaku petugas keamanan SDI Tompokersan Lumajang.
- Samsul selaku penjaga Masjid Al Huda Lumajang.

- Bayu selaku penjaga Gereja Kristus Tuhan Haleluyah Lumajang.
- Rudi selaku satpam Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.

d) Guru :

- Muizul selaku guru TU MAN Lumajang.
- Malik selaku guru BK MAN Lumajang.
- Fajar selaku guru Qur'an Hadis dan Penjaga UKS MTsN Lumajang.

e) Masyarakat :

- Heri selaku Pasukan Kuning atau Tukang Bersih Taman Bermain.
- Kholil selaku Pasukan Kuning atau Tukang Bersih Taman Bermain.

2. Data Sekunder

Pengertian Data Sekunder ialah sejumlah data tambahan guna memperlengkap data yang telah ada atau data utama/primer.³⁴ Untuk data pelengkap ini, peneliti peroleh melalui jurnal ilmiah, buku, pendapat serta bentuk penelitian lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

³⁴ Novika Rismawan, "Kerjasama Pengelolaan Buah Swalayan di Desa Manunggal Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/244/7/08220040>

Pengertian Teknik pengumpulan Data ialah langkah sistematis untuk memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan.³⁵ Metode observasi, wawancara serta dokumentasi di lokasi penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data dan keterangan. Maka, langkah-langkah yang dilakukan diantaranya :

1. Observasi

Observasi merupakan usaha yang dikerahkan dengan mengamati obyek penelitian menggunakan alat indera.³⁶ Cara ini digunakan dengan melihat, mengamati serta mendengar untuk menemukan jawaban dari peristiwa yang terjadi, kemudian dicatat, direkam, serta dipotret untuk diabadikan dan menjadi bukti lapangan.

Mudahnya, observasi adalah kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis atas peristiwa-peristiwa yang sedang diteliti. Observasi juga tidak hanya diartikan sebagai pengamatan secara langsung saja, melainkan juga secara tidak langsung.

Dimana observasi dilakukan di tempat-tempat tertentu yang masuk dalam lingkup Kawasan Tanpa Rokok sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, diantaranya yaitu fasilitas pelayanan kesehatan (seperti Puskesmas Kecamatan Lumajang; Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang; Laboratorium Kesehatan Jenggolo Lumajang), tempat proses belajar-

³⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian Hukum, cetakan ketiga*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 211.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 107.

mengajar (seperti MAN Lumajang; MTsN Lumajang; SD Islam Tompokersan Lumajang), Tempat Ibadah (seperti Masjid Al Huda Lumajang; Gereja Kristus Tuhan Halleluyah Lumajang), angkutan umum (seperti Bus; Mikrolet), ruang kerja (seperti Kantor Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lumajang; Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang), taman bermain (seperti *Play Ground* Alun-Alun Kota Lumajang), tempat umum dan tempat lain yang ditentukan (seperti SPBU Pertamina 54.673.12; Rumah Makan Kemayoran Lumajang; Graha Mulia Plaza Lumajang).

Dari beberapa tempat yang disebutkan, terdapat tempat yang mampu menjalankan poin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan baik. Dimana beberapa tempat tersebut sudah memasang simbol atau tulisan ‘dilarang merokok’ di beberapa bagian tempat yang terlihat. Seperti fakta yang ditemukan di Puskesmas Kecamatan Lumajang dan Laboratorium Kesehatan Jenggolo Lumajang yang sangat memperketat kegiatan merokok di wilayah tersebut. Perokok benar-benar dilarang untuk merokok dan dengan tegas pasien/tamu yang masih merokok diusir dari area puskesmas/laboratorium. Sedangkan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang tidak menerapkan dengan baik poin tersebut. Meskipun simbol

dan tulisan ‘dilarang merokok’ banyak ditemukan di beberapa tempat, namun kegiatan merokok masih banyak dilakukan oleh tamu, pengunjung hingga keluarga pasien. Tindakan tegas pun telah diberikan oleh satpam sebagai penanggung jawab keamanan, beberapa perawat yang melihat kegiatan tersebut juga selalu mengingatkan agar tidak merokok di lingkungan rumah sakit. Namun, hal ini hanya didengar saja dan tidak dilakukan dengan baik oleh tamu, pengunjung atau keluarga pasien. Beberapa tempat lainnya juga memiliki permasalahan yang sama, beberapa telah menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan baik, tapi beberapa juga kurang maksimal bahkan tidak menerapkan dengan baik Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut.

2. Wawancara (*Interview*)

Pengertian wawancara atau (*interview*) ialah perbincangan yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Proses perbincangan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban dengan melakukan kegiatan tanya jawab dengan bertatap muka antara narasumber dan penanya dan disertai panduan wawancara (*interview guide*).³⁷

³⁷ Novika Rismawan, “Kerjasama Pengelolaan Buah Swalayan di Desa Manunggal Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/244/7/08220040>

Untuk wawancara dilakukan dengan Plt. Kasubag Hukum Fira Yofiana dan beberapa partisipan lainnya seperti satpam, tukang parkir, tenaga kesehatan, pegawai pom bensin, guru-guru sekolah, hingga penjaga masjid. Berikut partisipannya yakni sebagai berikut:

a) Aparatur Sipil Negara :

- Fira Yofiana selaku Plt. Kasubag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.
- Dimas selaku pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

b) Tenaga Kesehatan :

- Intan Pratiwi selaku salah satu pegawai Laboratorium Klinik Jenggolo Lumajang.

c) Petugas Keamanan :

- Yatno selaku tukang parkir dan petugas keamanan Puskesmas Kecamatan Lumajang.
- Agus selaku petugas keamanan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang.
- Rudi selaku satpam Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
- Yono selaku petugas keamanan MAN Lumajang.
- Yadhi selaku petugas keamanan MTsN Lumajang.
- Roni selaku petugas keamanan SDI Tompokersan Lumajang.
- Samsul selaku penjaga Masjid Al Huda Lumajang.
- Bayu selaku penjaga Gereja Kristus Tuhan Halleluyah Lumajang.

d) Guru :

- Muizul selaku guru TU MAN Lumajang.
- Malik selaku guru BK MAN Lumajang.
- Fajar selaku guru Qur'an Hadis dan Penjaga UKS MTsN Lumajang.

e) Masyarakat :

- Heri selaku Pasukan Kuning atau Tukang Bersih Taman Bermain.
- Kholil selaku Pasukan Kuning atau Tukang Bersih Taman Bermain.

E. Teknis Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif-deskriptif yakni memberikan gambaran serta analisis dari fenomena yang diteliti dengan menjelaskan fokus penelitian dari masalah apa yang diteliti.³⁸ Langkah dalam pengolahan datanya ialah seperti berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing yakni dilakukannya pemeriksaan untuk kemungkinan kesalahan yang ada dalam pengisian informasi dengan melakukan penelitian ulang pada catatan, berkas, serta informasi yang terkumpul.³⁹ Pemeriksaan ulang dilakukan untuk menyesuaikan kelengkapan data yang ada, memiliki makna yang jelas, hingga hubungannya dengan data lainnya. Peneliti melakukan pemeriksaan data dengan memilah dan

³⁸ Ibid.

³⁹ Arina Manna Sikana Akbar, "Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019 Persepektif *Maslahah Mursalah*", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21103/7/15230010/>

memilih informasi yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Maqashid Syari'ah*.

2. Pengelompokan Data (*Classifying*)

Pengertian *classifying* adalah mengelompokkan data yang didapatkan untuk memudahkan dalam pembacaan ulang data serta disesuaikan dengan yang diperlukan.⁴⁰ Apabila data yang diperoleh telah diedit, maka selanjutnya perlu memetakan atau memilah data lalu memberikan beberapa rencana tertentu agar mempermudah dalam pembahasan, serta memberikan poin-poin tertentu dan dilakukan pengecekan ulang pada data-data yang terkumpul agar mendapatkan data yang valid dan terjamin sehingga memudahkan dalam melakukan analisis.⁴¹ Dalam tahap ini, peneliti mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan tema penelitian yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Maqashid Syari'ah* agar memudahkan peneliti dalam menghasilkan penelitian yang valid dan sesuai harapan.

3. Verifikasi Data (*Verifying*)

⁴⁰ LKP2M, *Research Book For LKP2M*, (Malang: UIN, 2005), 60.

⁴¹ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Surabaya: Prenadamedia Group, 2005), 136.

Verifikasi Data (*Verifying*) ialah menelaah secara mendalam bahan hukum yang diperoleh untuk memastikan validitasnya terjamin.⁴² Verifikasi Data digunakan untuk mendapatkan data serta informasi yang akurat yang nantinya menjadi jawaban dari pertanyaan penelitian. Selain itu, juga mempermudah dalam menganalisis data yang telah diperoleh dan memastikan bahwa validitasnya terjamin, dapat diakui serta dibaca oleh pembaca.⁴³ Pada tahap ini, peneliti melakukan verifikasi data dari bahan hukum yang sudah terkumpul dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pokok pembahasan yakni implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Maqashid Syari'ah*.

4. Analisis Data (*Analyzing*)

Analisis Data ialah kegiatan melakukan analisis data dari data awal didapatkan, dengan melakukan proses tahapan yang ada sehingga bisa dianalisis serta diambil kesimpulan. Dalam penelitian yuridis-kualitatif, langkah untuk menganalisis mempunyai sifat spesifik yang perlu dilakukan dari suatu hukum yakni tidak memakai statistik. Dikarenakan sifatnya adalah berbentuk kajian hukum murni. Teori kebenarannya yang

⁴² Arina Manna Sikana Akbar, "Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019 Perspektif *Maslahah Mursalah*", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21103/7/15230010/>

⁴³ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 19.

pragmatis ini dengan tepat digunakan secara praktis dalam bermasyarakat.⁴⁴

Disini peneliti menganalisis permasalahan dengan bahan hukum yang ada untuk mengetahui terkait penelitian implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Maqashid Syari'ah*.

5. Penandaan Data (*Concluding*)

Setelah melewati beberapa tahapan serta data telah tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah mencari kesimpulan dari data-data tersebut atau disebut dengan *concluding*. Dalam menarik kesimpulan, diperlukan mencari pesan yang memiliki karakteristik dengan cara objektif dan sistematis.⁴⁵ Pada tahap akhir ini, perlu dicermati kembali dengan mengecek bahan hukum yang ada disertai pisau analisisnya yakni dan *Maqashid Syari'ah*.

⁴⁴ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 36.

⁴⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 62.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Daerah Kabupaten Lumajang ialah daerah di Jawa Timur dengan jumlah 21 kecamatan yang memiliki batas wilayah yakni sebelah utara adalah Kabupaten Probolinggo, sebelah timur adalah Kabupaten Jember, sebelah selatan adalah Samudera Hindia dan sebelah barat adalah Kabupaten Malang.⁴⁶

Secara geografis, Kabupaten Lumajang berada pada posisi 112° - 53` - 113° - 23` Bujur Timur dan 7° - 54` - 8° - 23` Lintang Selatan. Kabupaten Lumajang beriklim tropis berdasarkan klasifikasi Schmid dan Ferguson.⁴⁷

Berikut gambaran umum terkait Kantor Pemerintah Kabupaten Lumajang hingga kawasan yang masuk dalam Kawasan Tanpa Rokok, sebagai berikut:

1. Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang

Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang berlokasi di Jalan Alun-Alun Utara Nomor

⁴⁶ Anonim, "Keadaan Wilayah Kabupaten Lumajang", *Kabupaten Lumajang*, diakses 4 April 2021, <https://lumajangkab.go.id/main/gambaran>

⁴⁷ Ibid,

7, Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316. Disebelah kanannya terdapat Komando Resort Militer 083 Baladhika Jaya Komando Distrik Militer 0821, Polisi Resort Kabupaten Lumajang, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Disebelah kirinya terdapat Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Bank BTPN, dan Laboratorium Medis Perdana Lumajang.

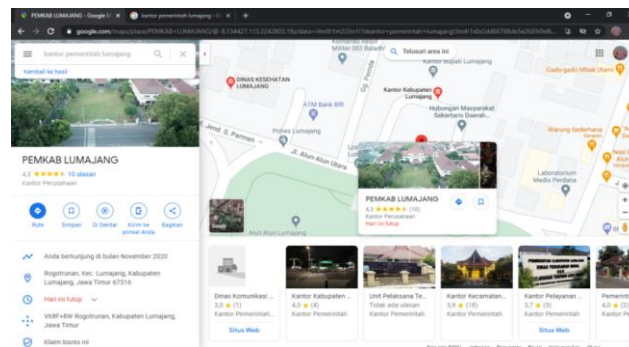
Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang ini meliputi FORKOPIMDA, Sekretariat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis, BUMD dan Kecamatan. Sedangkan didalam Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang meliputi Kantor Bupati Lumajang dan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dikelilingi kantor badan/dinas dalam satu halaman yakni Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) disebelah kiri, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) disebelah kanan, serta Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) dibelakang Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. Sedangkan bagian-bagian didalam Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang yakni Bagian Administrasi Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Rumah Tangga dan Protokol, Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian Organisasi, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Bagian Umum, dan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa.



Gambar 4.1 Lambang Daerah



Gambar 4.2 Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang



Gambar 4.3 Peta Lokasi Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang

Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang memiliki visi dan misi yakni sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁸ Anonim, “Visi Misi”, *Kabupaten Lumajang*, diakses 5 April 2021, <https://lumajangkab.go.id/main/visi-misi>

a. Visi :

Terwujudnya masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat.

b. Misi :

- Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata;
- Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
- Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi.

2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

a. Puskesmas Rogotruman Kecamatan Lumajang

Puskesmas Rogotruman Kecamatan Lumajang terletak di Jalan Brantas Nomor 5, Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316. Puskesmas Rogotruman Kabupaten Lumajang memiliki visi misi sebagai berikut, yaitu:⁴⁹

⁴⁹ Rosalia Retno Gayatri, “Visi Misi Puskesmas Rogotruman”, *Puskesmas Rogotruman Kabupaten Lumajang*, diakses 5 April 2021, <http://www.puskesmasrogotruman.or.id/p/visi-terwujudnya-masyarakat-kecamatan.html>

- Visi :

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Lumajang sehat dan mandiri Tahun 2019.

- Misi :

- 1) Menggerakkan pembangunan Kecamatan Lumajang yang berwawasan kesehatan;
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan pelayanan prima;
- 3) Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat;
- 4) Menciptakan kemandirian keluarga dalam membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat.

Selain itu, Puskesmas Rogotruran memiliki tujuan dan tata nilai yakni sebagai berikut:⁵⁰

- Tujuan :

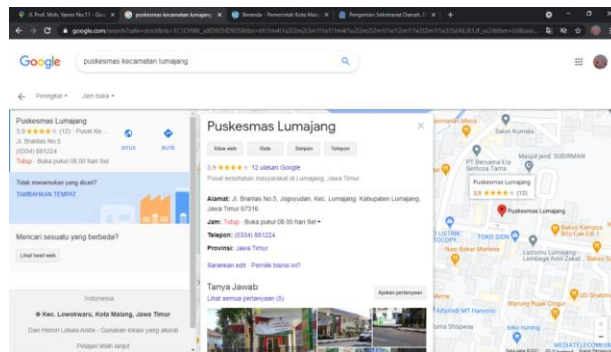
Terwujudnya tujuan pembangunan kesehatan masyarakat Kecamatan Lumajang sehat dan mandiri agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat.

- Tata Nilai : BERUBAH

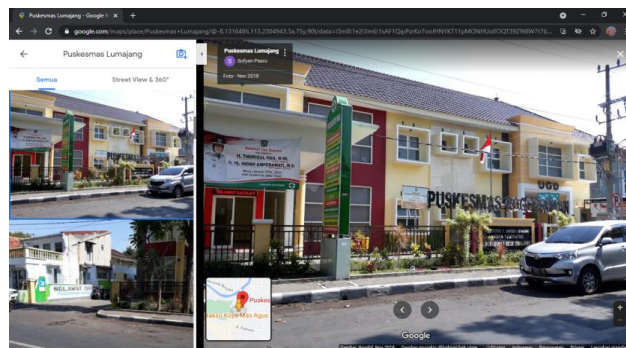
Be Bersemangat (Tidak mudah putus asa)

⁵⁰ Ibid.

- R Ramah (Senyum, salam, sapa, sopan, santun, sabar)
- U Utamakan (Utamakan kepentingan pelanggan)
- B Bersama (Terpadu, kompak, sinergi, rukun, gembira)
- Ah Amanah (Jujur, bisa dipercaya, disiplin, profesional)



Gambar 4.4 Peta Lokasi Puskesmas Rogotrunan Kabupaten Lumajang

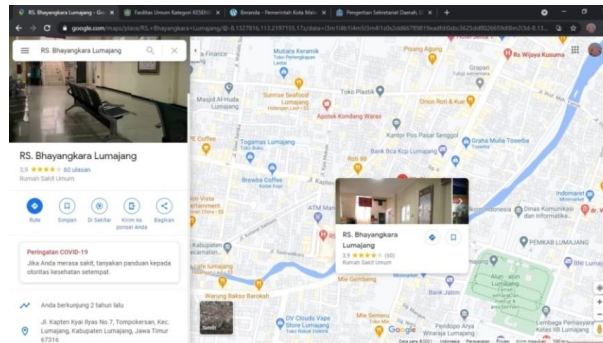


Gambar 4.5 Puskesmas Rogotrunan Kabupaten Lumajang

b. Rumah Sakit Bhayangkara Kabupaten Lumajang

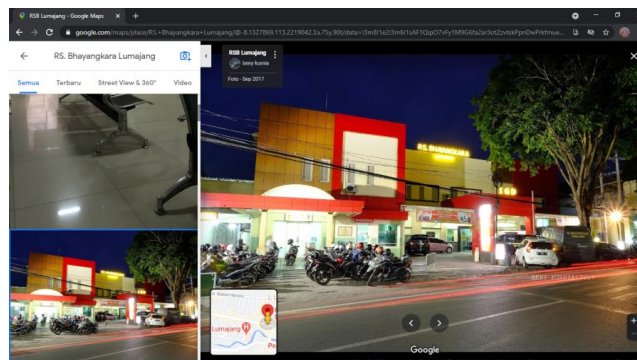
Rumah Sakit Bhayangkara Kabupaten Lumajang terletak di Jalan Kapten Kyai Ilyas Nomor 7, Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316. Rumah Sakit

Bhayangkara Kabupaten Lumajang memiliki motto yakni “Bersama Kita Berubah Menjadi Lebih Baik”.⁵¹



Gambar 4.6 Peta Lokasi Rumah Sakit Bhayangkara Kabupaten

Lumajang

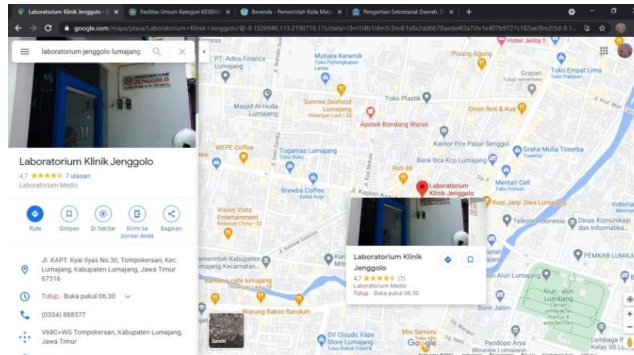


Gambar 4.7 Rumah Sakit Bhayangkara Kabupaten Lumajang

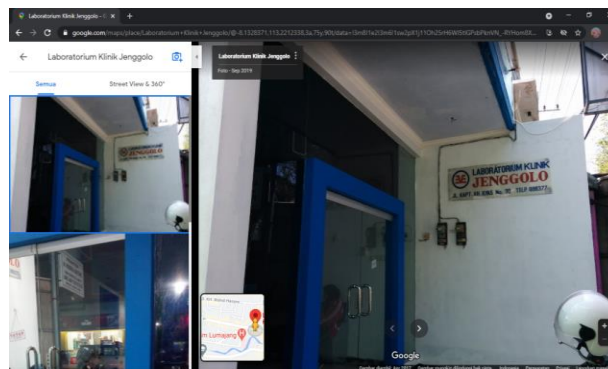
c. Laboratorium Klinik Jenggolo Kabupaten Lumajang

Laboratorium Klinik Jenggolo Kabupaten Lumajang terletak di Jalan Kapten Kyai Ilyas Nomor 30, Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316.

⁵¹ Anonim, “Beranda”, *RS. Bhayangkara Lumajang*, diakses 5 April 2021, <http://www.rumkitbhayangkaralumajang.com/>



Gambar 4.8 Peta Lokasi Laboratorium Klinik Jenggolo Kabupaten Lumajang



Gambar 4.9 Laboratorium Klinik Jenggolo Kabupaten Lumajang

3. Tempat Belajar Mengajar

a. Madrasah Aliyah Negeri Lumajang (MAN Lumajang)

MAN Lumajang terletak di Jalan Citandui Nomor 75, Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316. MAN Lumajang memiliki visi dan misi yakni sebagai berikut:⁵²

⁵² Anonim, "Profil Lembaga", *MAN Lumajang*, diakses 6 April 2021, <https://manlumajang.sch.id/profil/>

- Visi :

Terwujudnya insan yang bertaqwa, cerdas, terampil dan berbudaya lingkungan.

- Misi :

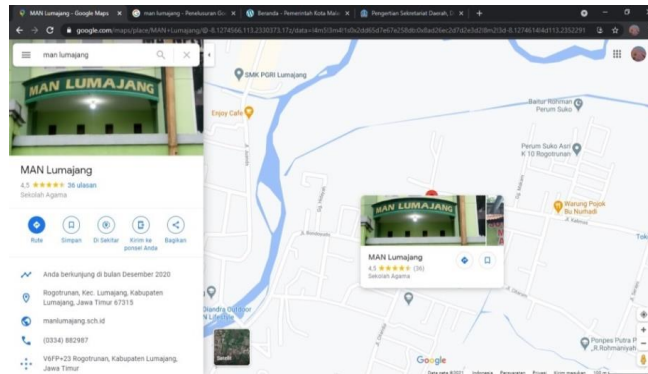
- 1) Menumbuhkan sikap dan *amaliyah* keagamaan berdasarkan nilai-nilai *rahmatan lil'alam*;
- 2) Menumbuhkembangkan semangat prestasi akademik dan non-akademik peserta didik yang peduli lingkungan dan berbudaya IT;
- 3) Meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelayanan terhadap peserta didik melalui pembelajaran berbasis teknologi;
- 4) Mendorong dan membantu peserta didik untuk menggali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal dengan memanfaatkan IT;
- 5) Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan dan perkembangan IT.

MAN Lumajang juga memiliki tujuan dalam menyelenggarakan pendidikan. Tujuan-tujuan tersebut yakni sebagai berikut:⁵³

- 1) Meningkatkan kualitas lulusan yang memiliki prestasi akademik tinggi;

⁵³ Ibid.

- 2) Menjadikan Madrasah Aliyah Negeri Lumajang sebagai madrasah rujukan;
- 3) Meningkatkan prestasi non-akademik dengan mengembangkan potensi, minat, dan bakat siswa;
- 4) Mewujudkan lulusan yang taat beribadah serta berakhlaqul *karimah*.



Gambar 4.10 Peta Lokasi MAN Lumajang

b. Madrasah Tsanawiyah Negeri Lumajang (MTsN Lumajang)

MTsN Lumajang berada di Jalan Citandui Nomor 75, Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316. Letaknya bersebelahan dengan MAN Lumajang. MTsN Lumajang ini memiliki visi dan misi sebagai berikut:⁵⁴

- Visi :
Cerdas – Terampil – Bertaqwa.

⁵⁴ Anonim, “Visi Misi”, *MTs NEGERI 1 LUMAJANG The Islamic Culture School*, diakses 6 April 2021, <http://mtsn1lumajang.sch.id/visi-misi/>

- Misi :

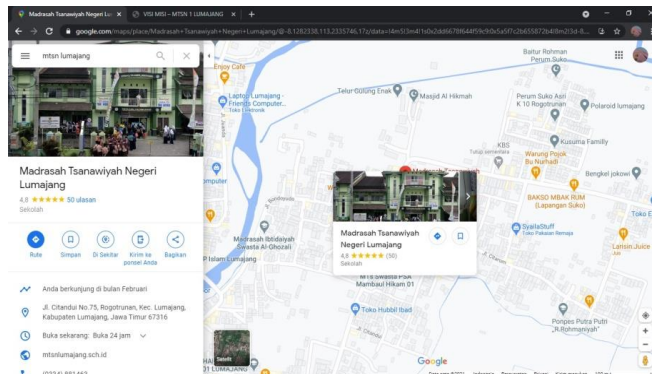
- 1) Menumbuhkembangkan semangat prestasi akademik dan non-akademik;
- 2) Mendorong dan membantu siswa untuk menggali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal;
- 3) Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan;
- 4) Menumbuhkembangkan sikap dan *amaliah* keagamaan;
- 5) Mewujudkan budaya dan lingkungan madrasah yang sehat dan islami.

Selain itu, MTsN Lumajang juga memiliki tujuan yang berisikan hal sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Mewujudkan kondisi madrasah sesuai dengan Standart Nasional Pendidikan (SNP);
- 2) Meningkatkan kualitas lulusan yang memiliki prestasi akademik tinggi;
- 3) Menjadikan madrasah terpadu (MTs-MA) Negeri Lumajang sebagai madrasah rujukan;
- 4) Meningkatkan prestasi non-akademik dengan mengembangkan potensi, minat, dan bakat siswa;

⁵⁵ Ibid.

- 5) Mewujudkan lulusan yang taat beribadah serta berakhlakul karimah;
- 6) Terciptanya budaya madrasah yang berwawasan lingkungan bersih, sehat, dan islami.



Gambar 4.11 Peta Lokasi MTsN Lumajang

c. Sekolah Dasar Islam Tompokersan Lumajang (SDI Tompokersan Lumajang)

SD Islam Tompokersan Lumajang terletak di Jalan Kapten Kyai Ilyas Nomor 12, Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316.⁵⁶ SD Islam Tompokersan Lumajang juga memiliki visi, misi serta tujuan. Berikut visi, misi dan tujuannya:

- Visi :

Terwujudnya peserta didik yang taqwa, kreatif dan unggul.

⁵⁶ Anonim, "Profil Sekolah", *SD Islam Tompokersan Lumajang*, diakses 6 April 2021, <https://www.sditompokersan.sch.id/profil-sekolah/>

Indikator Visi :

- 1) Taqwa : Peserta didik patuh dan taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mematuhi perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya;
- 2) Kreatif : Peserta didik yang memiliki daya cipta kemampuan untuk menciptakan;
- 3) Unggul : Peserta didik yang lebih tinggi (pandai, baik, cakap, terampil, berbudaya) dari lainnya.

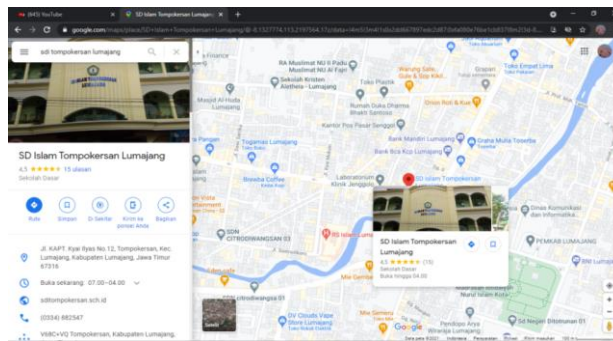
- Misi dan Tujuan :

Indikator Misi dengan tujuan peserta didik dapat:

- 1) Melakukan sholat berjamaah tepat waktu tanpa diperintah;
- 2) Melakukan do'a sebelum dan sesudah melakukan kegiatan;
- 3) Membaca Al-Qur'an setiap hari;
- 4) *Tawadu'* pada orangtua, guru, dan orang yang lebih tua;
- 5) Tertib berada di mushollah dan di ruang makan;
- 6) Bersalaman serta mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru, masuk ruangan;
- 7) Melakukan pembiasaan budaya antri;
- 8) Melakukan pembiasaan menjaga lingkungan tetap bersih dengan membuang sampah di tempat sampah;

- 9) Melakukan pembelajaran dengan menggunakan media elektronik;
- 10) Melakukan pembelajaran diluar kelas langsung pada narasumbernya (*outing class, outdoor learning*);
- 11) Melakukan pembiasaan kunjungan ke perpustakaan dengan referensi yang banyak;
- 12) Melakukan pembelajaran di Labotorium IPA;
- 13) Mengoptimalkan pembelajaran di Laboratorium Komputer;
- 14) Membiasakan diri membaca (berliterasi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai);
- 15) Melakukan ulangan, ujian berbasis computer (CBT);
- 16) Pembinaan akademik dan non-akademik secara *intern* dan *ekstern* dengan jadwal yang ditentukan;
- 17) Mengikuti kompetisi akademik dan non-akademik yang diselenggarakan dinas dan penyelenggara diluar kedinasan;
- 18) Pemberian *reward* dan *punishment* bagi siswa;
- 19) Meng-*explore* ketangkasan dengan mengikuti *outbond*;
- 20) Melakukan Bakti Sosial sebagai bentuk peduli pada lingkungan sekitar sekolah dan warga kurang mampu serta anak yatim;

- 21) Dipertemukan secara berkala para alumni untuk memberikan wawasan pada peserta didik khususnya kelas 6;
- 22) Melakukan bimbingan belajar secara khusus pada siswa kelas 6;
- 23) Menghafal Al-Qur'an dengan *istiqomah* setiap hari pada jam ke nol (siswa tertentu).

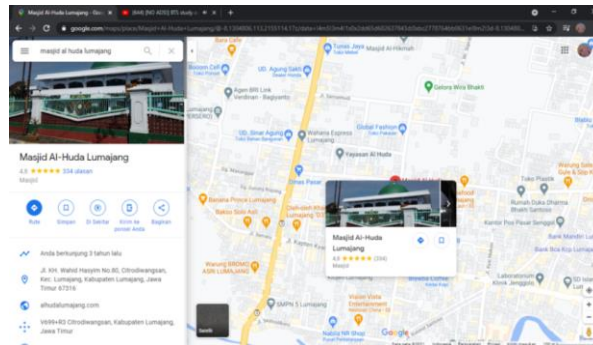


Gambar 4.12 Peta Lokasi SD Islam Tompokersan Lumajang

4. Tempat Ibadah

a. Masjid Al Huda Lumajang

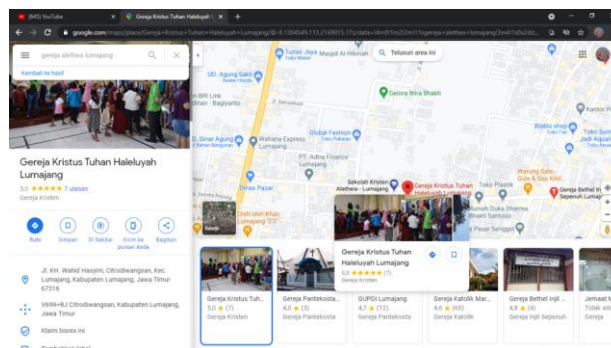
Masjid Al Huda Lumajang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 80, Citrodwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316.



Gambar 4.13 Peta Lokasi Masjid Al Huda Lumajang

b. Gereja Kristus Tuhan Halleluyah Lumajang

Gereja Kristus Tuhan Halleluyah Lumajang terletak pada Jalan KH. Wahid Hasyim, Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316.



Gambar 4.14 Peta Lokasi Gereja Kristus Tuhan Halleluyah Lumajang

5. Angkutan Umum

a. Bus

Terminal Minak Koncar atau Terminal Wonorejo Lumajang ialah terminal dengan penumpang tipe B dan terminal induk terbesar

didaerah Lumajang.⁵⁷ Nama ‘Minak Koncar’ diambil dari nama tokoh pendiri dan penguasa Lamadjang Tigang Juru.⁵⁸ Terminal Minak Koncar Lumajang ini terletak di Jalan Raya Wonorejo Nomor 23 Dusun Krajan, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur 67358.⁵⁹

Rute Bus terbagi menjadi dua rute yakni Rute Bus Antarkota Kelas Ekonomi dan Rute Bus Antarkota Kelas Non Ekonomi. Angkutan Antarkota Kelas Ekonomi sebagian besar dilayani oleh armada *bigbus*. Armada *medium bus* digunakan untuk melayani trayek Malang via Dampit. Sedangkan armada *bigbus* digunakan untuk melayani trayek jarak menengah seperti kota-kota besar di Jawa Timur yakni Surabaya, Malang, Trenggalek serta Madura. Untuk metode pembayarannya juga dilayani langsung diatas kendaraan (oleh kondektur) tanpa melalui agen/loket bus. Sedangkan Rute Bus Antarkota Kelas Non Ekonomi seluruhnya dilayani oleh armada *bigbus*. Kelas Non Ekonomi merujuk beberapa tingkatan diatas kelas ekonomi seperti patas, bisnis, VIP, eksekutif, super eksekutif dan *suite*

⁵⁷ Sentral FM Lumajang, “Pemprov Jatim Ambil Alih Pengelolaan Terminal Minak Koncar Lumajang”, *Suarasurabaya.net*, 12 Oktober 2016, diakses 11 April 2021, <https://www.suarasurabaya.net/jaring-radio/2016/Pemprov-Jatim-Ambil-Alih-Pengelolaan-Terminal-Minak-Koncar-Lumajang/>

⁵⁸ Firdha Rizqi, “Pendiri Lumajang; Banyak Wide, Arya Wiraraja atau Menak Koncar”, *Lontar Madura*, 03 November 2013, diakses 11 April 2021, <https://www.lontarmadura.com/pendiri-lumajang-banyak-wide-arya-wiraraja-atau-menak-koncar/>

⁵⁹ Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, “Sarana Perhubungan”, *Kabupaten Lumajang*, diakses 11 April 2021, <https://lumajangkab.go.id/fasum/index/perhubungan/terminal#>

class. Untuk metode pembayarannya bus antarkota trayek Patas Jawa Timur dan Bali dilayani langsung diatas kendaraan (oleh kondektur). Metode pembayarannya bus antarkota jarak jauh seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Jakarta, Banten dan Lintas Sumatera hanya dilayani di loket/agen penjualan tiket resmi yang tersedia di sepanjang Jalan Raya Wonorejo, Kedungjajang. Sebagian besar trayek bus antarkota jarak jauh memiliki titik awal keberangkatan dari Terminal Brawijaya, Banyuwangi dan Terminal Tawangalun, Jember.⁶⁰

Terdapat transportasi dari luar kota yang melewati Lumajang seperti Kereta Api, Kendaraan Pribadi hingga Bus. Berikut jalur Bus dari luar kota menuju Lumajang:⁶¹

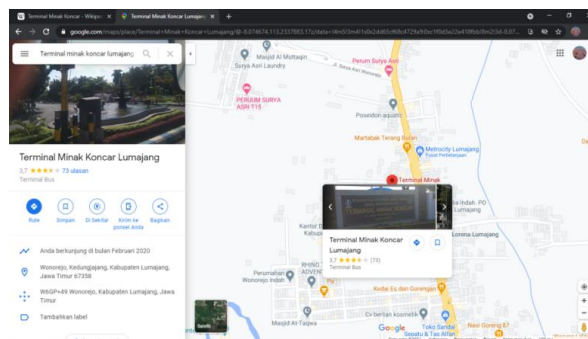
- Dari arah barat (Surabaya) naik bus jurusan Jember/Banyuwangi:
Terminal Purabaya (Bungurasih, Surabaya) – Terminal Bayuangga (Probolinggo jika mampir/oper) – Terminal Minak Koncar (Lumajang).
- Jika dari Surabaya harus turun di Terminal Bayuangga (Probolinggo), maka perjalanan bisa dilakukan dengan naik bus jurusan Banyuwangi/angkutan antar kota jurusan Lumajang lalu bisa turun di Terminal Minak Koncar.

⁶⁰ Wikipedia, “Terminal Minak Koncar”, *Wikipedia*, 29 Desember 2020, diakses 11 April 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal_Minak_Koncar#cite_note-:0-7

⁶¹ Anonim, “Transportasi dan Tujuan”, *Transportasi Lumajang*, diakses 11 April 2021, <https://transportasilumajang.wordpress.com/2014/04/04/transportasi-dan-tujuan/>

- Dari arah timur (Banyuwangi/Jember) naik bus jurusan Surabaya:
Banyuwangi – Terminal Tawang Alun (Jember) – Terminal Minak Koncar.

Apabila tujuannya adalah daerah Lumajang perbatasan Malang, maka dapat menaiki bus dengan jurusan Dampit, Malang. Apabila yang dituju adalah daerah Lumajang perbatasan Jember, maka dapat menaiki bus jurusan Ambulu, Jember. Jikapun kearah Probolinggo, maka bisa menggunakan bus tujuan Probolinggo/Surabaya.⁶²



Gambar 4.15 Peta Lokasi Terminal Minak Koncar atau Terminal Wonorejo Lumajang

⁶² Ibid.



Gambar 4.16 Bus Non Ekonomi (Patas)



Gambar 4.17 Bus Ekonomi

b. Mikrolet

Angkutan Kota adalah salah satu bentuk dari sarana transportasi yang mempunyai fungsi sarana pergerakan manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu, merupakan sarana transportasi alternatif didalam kota, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi.⁶³

Rute Angkutan Kota menghubungkan Terminal Minak Koncar dengan kawasan perkotaan seperti Sukodono dan Lumajang. Ada tiga trayek aktif yang melayani penumpang dari Terminal Minak Koncar

⁶³ Ira Rachmani Achadiyah, Eddi Basuki Kurniawan dan Septiani Hariyani, “Kinerja dan Rute Pelayanan Angkutan Kota di Kawasan Perkotaan Lumajang-Kabupaten Lumajang”, *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, No. 2 (2010) : 9, <https://tatakota.ub.ac.id/index.php/tatakota/article/view/103/102>

ini. Seluruh trayek angkutan kota Lumajang memiliki lintasan jalur berangkat melalui Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Ahmad Yani, Jalan PB. Sudirman dan Alun-Alun. Sedangkan untuk jalur kembali akan melalui Jalan Imam Bonjol, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Gatot Subroto, Jalan Sunandar Priyo Sudarmo dan Jalan Soekarno-Hatta.⁶⁴

Rute Angkutan Pedesaan menghubungkan pusat kota dengan kawasan pedesaan di Lumajang seperti Gucialit, Senduro, Candipuro dan Kunir. Selain itu, angkutan ini juga terhubung dengan beberapa kota di sekitar Lumajang seperti Tanggul, Kencong dan Probolinggo. Angkutan desa ini memiliki tujuh trayek angkutan pedesaan yang sebagian besar yang memiliki titik awal dan akhir dari Terminal MPU (Mobil Penumpang Umum) Lumajang. Letak Terminal MPU ini berbeda dengan Terminal Minak Koncar, yakni Embong Kembar Jalan Gubernur Suryo Tompokersan. Beberapa trayek angkutan pedesaan akan transit dan melintasi terminal bus sebelum melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir.⁶⁵

Jalur Mikrolet dibagi menjadi dua jalur yakni sebagai berikut:⁶⁶

- Apabila tujuannya adalah Situs Biting, Alun-Alun, Kuliner Stadion, Pemandian Selokambang, Kebun Teh Gucialit dan daerah

⁶⁴ Wikipedia, "Terminal Minak Koncar", *Wikipedia*, 29 Desember 2020, diakses 11 April 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal_Minak_Koncar#cite_note-:0-7

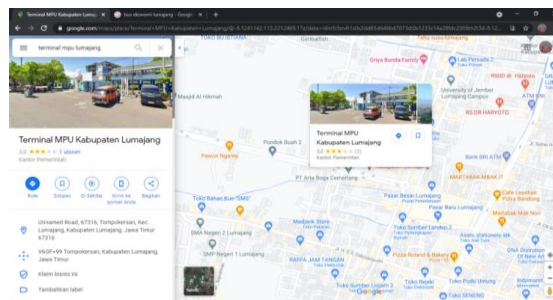
⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Anonim, "Transportasi dan Tujuan", *Transportasi Lumajang*, diakses 11 April 2021, <https://transportasilumajang.wordpress.com/2014/04/04/transportasi-dan-tujuan/>

lereng Semeru (Senduro), maka menaiki ‘lin’ (khusus arah dalam kota) dan ‘angkot’ (arah kecamatan luar kota).

- Apabila tujuannya menuju Setiga Ranu Klakah, Pasar Buah Ranuyoso-Klakah dan Gunung Lemongan, maka menaiki ‘angkot’ jurusan Probolinggo.

Hal yang dimaksud dalam ‘lin’ diatas ialah sebutan masyarakat terhadap angkutan kota berwarna merah tua dengan merk *Suzuki Carry*, terdapat keterangan trayek lintasan di badan kendaraan. Sedangkan sebutan ‘angkot’ diatas ialah sebutan masyarakat terhadap angkutan pedesaan yang sebagian besar berupa kendaraan bermerk *Isuzu Elf*.⁶⁷



Gambar 4.18 Peta Lokasi Terminal MPU (Mobil Penumpang Umum)

Lumajang

⁶⁷ Wikipedia, “Terminal Minak Koncar”, *Wikipedia*, 29 Desember 2020, diakses 11 April 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal_Minak_Koncar#cite_note-:0-7



Gambar 4.19 Angkutan Kota



Gambar 4.20 Angkutan Desa

6. Ruang Kerja

- a. Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang

Pada halaman diatas, penulis telah mencantumkan alamat serta peta lokasi Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol Lumajang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 1 dengan Nomor Telpon (0334) 881586.⁶⁸ Berdasarkan Peraturan Bupati

⁶⁸ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, “Beranda”, *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*, diakses 8 April 2021, <https://bakesbangpol.lumajangkab.go.id/>

Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bakesbangpol memiliki Tugas Pokok dan Fungsi atau disebut Tupoksi.⁶⁹ Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjelaskan mengenai susunan organisasi Bakesbangpol yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing, terdiri dari:⁷⁰

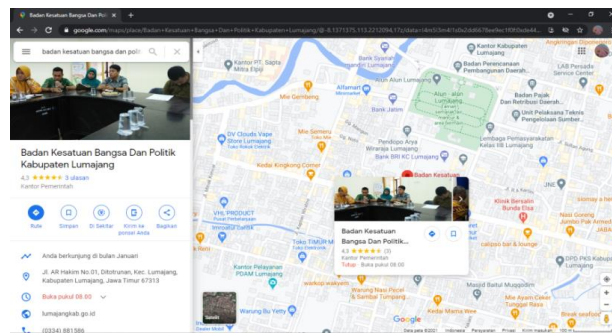
- Kepala Badan;
- Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- Bidang Kajian Masalah Strategis, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Wilayah.
- Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan;

⁶⁹ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, “Profil”, *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*, diakses 8 April 2021, <https://bakesbangpol.lumajangkab.go.id/>

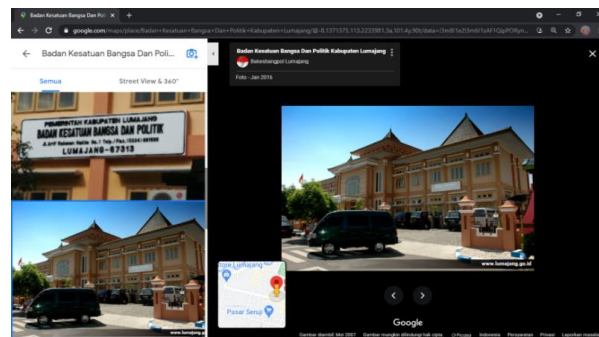
⁷⁰ Pasal 2 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2) Sub Bidang Bela Negara.

- Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Lembaga-lembaga Kemasyarakatan;
 - 2) Sub Bidang Lembaga-lembaga Daerah.
- Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 4.21 Peta Lokasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Gambar 4.22 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

c. Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang berada di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 7 Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang

dengan Nomor Telpn (0334) 8780990.⁷¹ Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi atau disebut Tupoksi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.⁷² Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan menyebutkan susunan organisasi Dinas Kesehatan ada beberapa bidang, semuanya memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang diantaranya sebagai berikut:⁷³

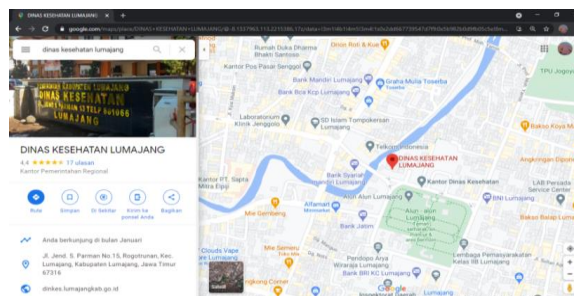
- Dinas Kesehatan;
- Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

⁷¹ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, “Beranda”, *Dinas Kesehatan*, diakses 8 April 2021, <https://dinkes.lumajangkab.go.id/>

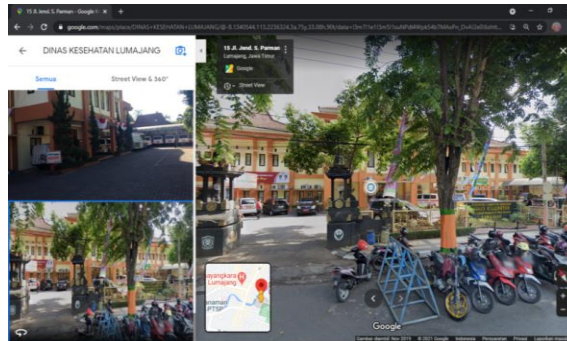
⁷² Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, “Profil”, *Dinas Kesehatan*, diakses 8 April 2021, <https://dinkes.lumajangkab.go.id/>

⁷³ Pasal 3 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

- Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
 - 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - 3) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
 - 1) Seksi Kefarmasian;
 - 2) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
 - 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- UPT;
- Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 4.23 Peta Lokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

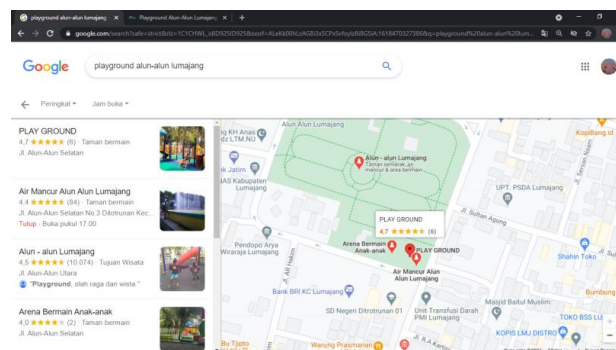


Gambar 4.24 Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

7. Tempat Bermain

a. *Play Ground* Alun-Alun Kota Lumajang

Play Ground Alun-Alun Kota Lumajang berlokasi di Jalan Alun-Alun Selatan, Ditotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67313.



Gambar 4.25 Peta Lokasi *Play Ground* Alun-Alun Kota Lumajang

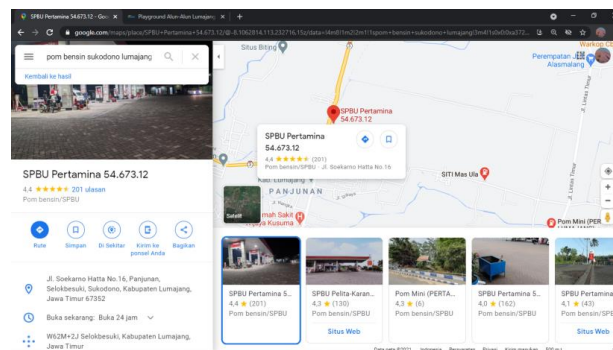


Gambar 4.26 Play Ground Alun-Alun Kota Lumajang

8. Tempat Umum dan Tempat lain yang ditentukan

a. Pom Bensin/SPBU Pertamina 54.673.12

Pom Bensin 54.673.12 terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 16, Panjunan, Selokbesuki, Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67352.



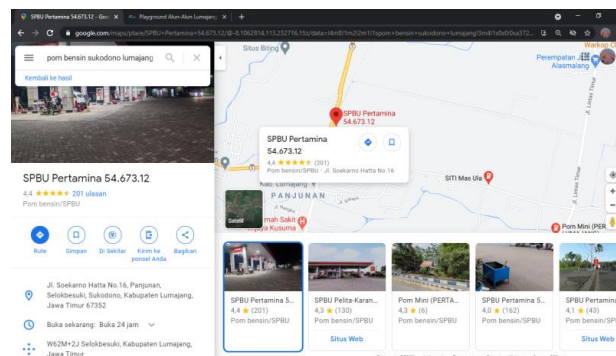
Gambar 4.27 Peta Lokasi SPBU Pertamina 54.673.12



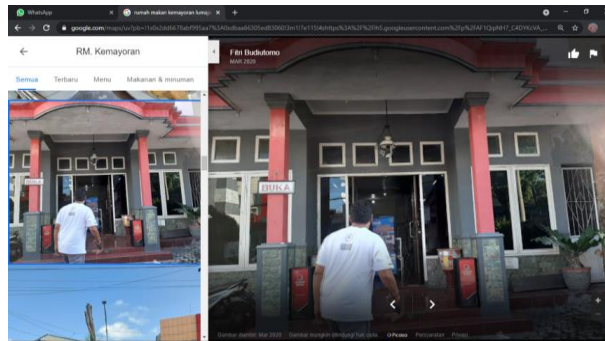
Gambar 4.28 SPBU Pertamina 54.673.12

b. Rumah Makan Kemayoran Lumajang

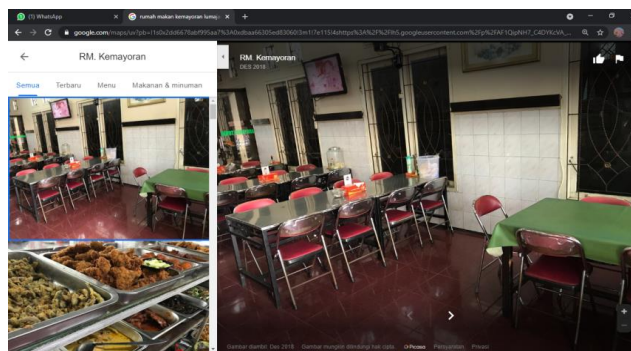
Rumah Makan Kemayoran Lumajang terletak di Jalan Kapten Kyai Ilyas Nomor 8, Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316.



Gambar 4.29 Peta Lokasi Rumah Makan Kemayoran Lumajang



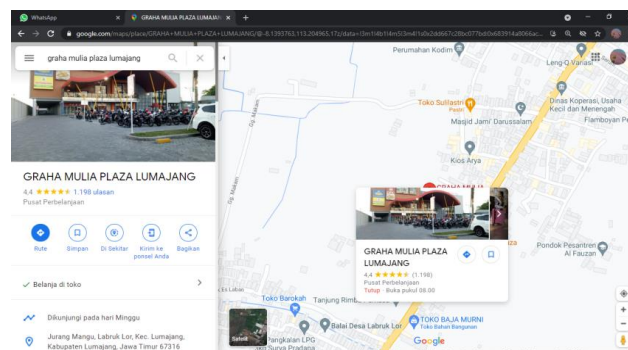
Gambar 4.30 Bagian Depan Rumah Makan Kemayoran Lumajang



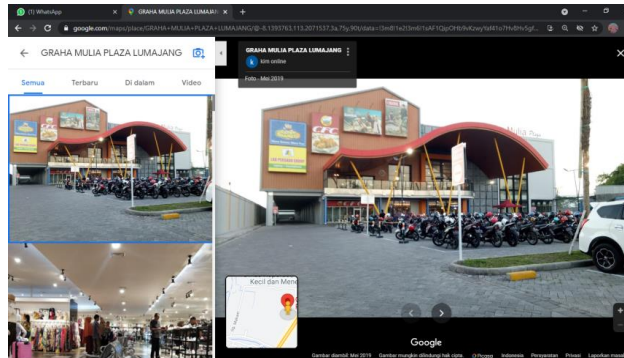
Gambar 4.31 Bagian Dalam Rumah Makan Kemayoran Lumajang

c. Graha Mulia Plaza Lumajang

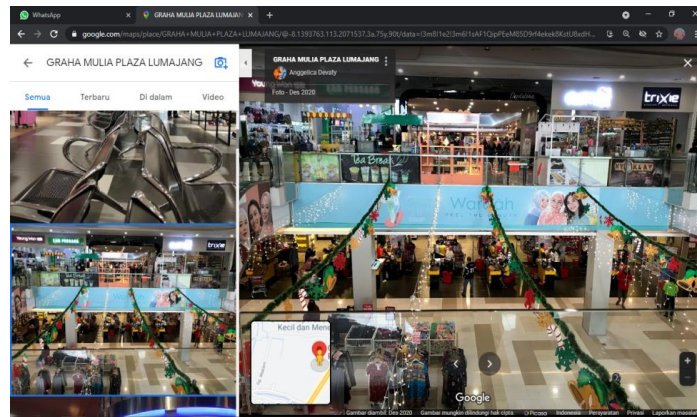
Graha Mulia Plaza Lumajang terletak Jurang Mangu, Labruk Lor, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316.



Gambar 4.32 Peta Lokasi Graha Mulia Plaza Lumajang



Gambar 4.33 Bagian Depan Graha Mulia Plaza Lumajang



Gambar 4.34 Bagian Dalam Graha Mulia Plaza Lumajang

B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

1. Peran Pemerintah dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang memiliki suatu peraturan daerah yakni Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dimana jelas dalam peraturan daerah

tersebut menjelaskan terkait tujuan pembentukan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, cakupan wilayah Kawasan Tanpa Rokok, Kewajiban Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok, Larangan dan Pengendalian, Peran serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, serta Ketentuan Peralihan.⁷⁴ Berdasarkan wawancara dengan Plt. Kasubag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang yakni Fira Yofiana menjelaskan bahwa pembentukan peraturan daerah ini merupakan usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang agar mampu menanggulangi penggunaan rokok yang tiap hari semakin meningkat. Apalagi dikarenakan penjualan rokok dijual dengan harga murah serta mudah didapat, mengakibatkan siapapun bisa membelinya, termasuk anak-anak.⁷⁵

Usulan ini sudah diajukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sejak lima tahun sebelum peraturan daerah ini disahkan. Butuh waktu lama untuk peraturan daerah ini dapat disahkan, dikarenakan usulan tersebut menimbulkan pro dan kontra baik di instansi pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang yang menganggap bahwa mereka tidak mendapatkan kebebasan untuk merokok

⁷⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

⁷⁵ Fira Yofiana, wawancara, (Lumajang, 23 November 2020)

terutama di tempat kerja.⁷⁶ Dikarenakan keadaan menjadi tidak memungkinkan jika hanya mengandalkan keputusan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang dan beberapa instansi pemerintah, maka terlebih dahulu dibuat Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok agar dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat tetap ada peraturan yang perlu ditaati. Sehingga dalam kurun waktu tahun 2016-2019, Kabupaten Lumajang menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam mengatur dan menata masyarakatnya.⁷⁷

Hingga pada tahun 2019, ketika hampir setengah dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang diganti dengan kabinet baru dan masih muda. Pada saat itu juga, Bupati Lumajang As'at Malik yang menjabat tahun 2015/2018 digantikan oleh Thoriqul Haq yang menjabat tahun 2018/2023. Setelah dilantiknya bupati baru inilah menjadi suatu kesempatan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang untuk mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.⁷⁸

Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok kini diperbarui dan berubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

⁷⁶ Fira Yofiana, wawancara, (Lumajang, 23 November 2020)

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Fira Yofiana, wawancara, (Lumajang, 23 November 2020)

Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan penjelasan dari Fira Yofiana selaku Plt. Kasubag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang menyebutkan bahwa peraturan bupati yang baru ini hanya memiliki perombakan sedikit dan tidak beda jauh dengan peraturan bupati kawasan tanpa rokok sebelumnya.⁷⁹

Setelah Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini disahkan, kantor pemerintah, badan/dinas, sekolah hingga kawasan yang masuk dalam lingkup Kawasan Tanpa Rokok menjalankan tugasnya dengan baik. Dimana semua orang yang bekerja ditempat-tempat yang masuk lingkup Kawasan Tanpa Rokok tersebut menaati peraturan untuk tidak merokok atau merokok kecuali ditempat khusus.⁸⁰

Bu Fira juga menambahkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok hanya berlangsung beberapa bulan saja setelah disahkan untuk didaerah Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang dan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. Memang telah disediakan tempat khusus merokok dekat dengan tempat parkir. Namun, banyak bapak-bapak yang memilih merokok di tangga yang merupakan tempat lalu lalang, didepan ruang kerja dan beberapa tempat lainnya. Kegiatan ini pun dilakukan

⁷⁹ Fira Yofiana, wawancara, (Lumajang, 15 Maret 2021)

⁸⁰ Fira Yofiana, wawancara, (Lumajang, 23 November 2020)

ketika mereka memiliki waktu senggang. Bukan hanya pada jam istirahat atau makan siang, kegiatan merokok bahkan bisa berlangsung sejak jam masuk kantor.⁸¹

Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang pun gencar untuk mempromosikan bagaimana bahaya rokok, dampak asap rokok, apa manfaatnya jika lingkungan tanpa adanya rokok, mengajak masyarakat untuk kerja bakti, menjaga kesehatan dengan tidak merokok dan lain-lain yang dimaksudkan agar peringatan bahaya rokok tidak hanya ditampilkan dalam wilayah Kawasan Tanpa Rokok atau dalam peraturan daerah saja, melainkan diperuntukkan untuk semua warga Lumajang dengan penyampaian secara langsung. Peran pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang ini biasanya berbentuk kampanye anti rokok, sosialisasi langsung hingga penyuluhan kepada pelajar ataupun masyarakat dengan diadakan kegiatan yang bersifat insidental seperti pada peringatan Hari Bebas Tembakau Sedunia atau sosialisasi bahaya rokok, melakukan aksi simpatik dengan mengajak masyarakat tidak merokok 1 hari, melakukan aksi deklarasi komitmen menerapkan kawasan tanpa rokok di sekolah/pondok pesantren, pembuatan media pamflet, spanduk, baliho, iklan di radio serta strategi promotif lainnya tentang bahaya merokok.⁸²

⁸¹ Fira Yofiana, wawancara, (Lumajang, 23 November 2020)

⁸² Fira Yofiana, wawancara, (Lumajang, 23 November 2020)

Sayangnya, informasi hanya bisa didapatkan dari perwakilan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. Sehingga tidak bisa diperoleh data spesifiknya menurut pandangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang pun tidak dapat untuk dimintai keterangan terkait Kawasan Tanpa Rokok dikarenakan masih disibukkan dengan vaksin Covid-19.

Penelitian terakhir pada bulan Maret bersama Fira Yofiana selaku Plt. Kasubag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang yang bahwa meski Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok telah disahkan pada bulan Juli 2019. Dari penelitian pada bulan Desember 2020 hingga Maret 2021, peraturan bupati kawasan tanpa rokok yang telah diperbarui belum disahkan dan dipublikasikan. Hingga peneliti mendapat *file* langsung dari Bu Fira pada wawancara terbaru bulan Maret 2021 dan menyebutkan bahwa diduga peraturan ini belum dipublikasikan di website JDIH Lumajang karena banyaknya pekerjaan yang dikerjakan pemerintah dan dibarengi kasus Covid-19 ini. Sehingga fokus pemerintah, banyak dihabiskan dalam penanggulangan Covid-19 ini.⁸³

Padahal hal ini menjadikan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok jadi terbelangkai dikarenakan poin-poin penting dalam peraturan daerah tidak dijelaskan lebih lanjut dan lengkap. Mengingat

⁸³ Fira Yofiana, wawancara, (Lumajang, 15 Maret 2021)

penjelasan tersebut terdapat dalam peraturan bupati. Sehingga pada awalnya, pemerintah seperti hanya membentuk peraturan tanpa diperjelas siapa penegak hukum dan lainnya. Sehingga berakibat, peraturan hanya berlangsung beberapa bulan, ditambah peraturan bupati tentang kawasan tanpa rokok yang menjelaskan sangat lengkap terkait kawasan tanpa rokok belum disahkan dan dipublikasikan, dan tidak adanya penegakan hukum karena penjelasan terkait penegak kawasan tanpa rokok terdapat dalam peraturan bupati.

2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, meliputi: a. fasilitas pelayanan kesehatan; b. tempat proses belajar-mengajar; c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah; e. angkutan umum; f. ruang kerja; dan g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.⁸⁴ Dikarenakan dampak Covid 19 mengakibatkan sulit dan terbatas untuk melakukan wawancara dengan pegawai yang berwenang, sehingga wawancara dilakukan kepada satpam, tukang parkir, hingga warga lain yang biasa beraktifitas di daerah Kawasan Tanpa Rokok tersebut yang tentunya tetap menaati protokol kesehatan. Berikut Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang

⁸⁴ Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok didalam wilayah Kawasan Tanpa Rokok, meliputi:

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Disini ada tiga tempat pelayanan kesehatan yang dipilih peneliti untuk dilakukan observasi dan wawancara, diantaranya adalah Puskesmas Kecamatan Lumajang, Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, dan Laboratorium Klinik Jenggolo Lumajang. Berikut hasil penelitiannya:

- Puskesmas Kecamatan Lumajang

Berdasarkan wawancara singkat dengan tukang parkir bernama Pak Yatno bahwa tidak pernah terlihat ada orang merokok di lingkungan Puskesmas Kecamatan Lumajang. Hal ini selain disebabkan karena tulisan ‘dilarang merokok’ yang ditulis sangat besar dekat pintu masuk, perawat atau bidan yang bertugas juga melarang tamu atau pasien untuk merokok. Dikarenakan tempat tersebut sering penuh dengan pasien dari yang tua dan muda, sehat atau sakit, anak-anak hingga ibu hamil. Selain itu, petugas atau perawat juga meminta untuk siapapun yang akan merokok agar mematikan rokok dan menyimpannya, dan bisa merokok bila nanti sudah berada rumah. Dari tindakan tegas semua pihak Puskesmas Kecamatan Lumajang, menjadikan kegiatan merokok tidak pernah

terlihat di lingkungan puskesmas. Dengan ini, tidak dibutuhkan adanya tempat khusus untuk merokok, pasien/tamu yang pergi ke puskesmas pun bisa menahan diri untuk tidak merokok.⁸⁵

Meskipun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok menyebutkan bahwa semua kawasan tanpa rokok harus menyediakan tempat khusus, namun melihat hasil wawancara diatas, bahwa semua pihak bekerja sama dengan baik dari pihak puskesmas, petugas kebersihan hingga tukang parkir. Sehingga melihat bagaimana ketatnya peraturan disana dan tindakan tegas tersebut menjadikan masyarakat dapat menaati peraturan dengan baik. Apalagi jika terlihat pasien/tamu yang nakal, tindakan tegas langsung diberikan pada saat itu juga dengan mengusir dan lain sebagainya. Pasien/tamu pun mendapatkan pelajaran dan tidak merokok di puskesmas yang merupakan kawasan tanpa merokok, dan bisa melanjutkannya nanti ketika sudah keluar dari area puskesmas.

- Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang

Berdasarkan wawancara singkat bersama salah satu satpam bernama Pak Agus menjelaskan bahwa banyak tulisan ‘dilarang merokok’ berupa pamflet, kertas, hingga banner diluar ataupun

⁸⁵ Yatno, wawancara, (Lumajang, 11 Februari 2021)

didalam gedung rumah sakit. Namun, banyak keluarga pasien, ataupun tamu yang datang tidak menghiraukan larangan tersebut. Sehingga kegiatan merokok masih sering terjadi di rumah sakit. Bila tidak ditegur oleh perawat atau satpam yang bertugas, maka tamu atau keluarga pasien tersebut tidak berhenti merokok. Akan tetapi, ketika satpam atau perawat telah pergi maka kegiatan tersebut dilanjutkan kembali. Pak Agus mengaku sering kesal menemukan tamu atau keluarga pasien yang keras kepala dan tidak bisa dikasih tahu. Meski begitu, karena sudah menjadi pekerjaannya sehingga Pak Agus tetap mengingatkan siapapun yang merokok didalam atau diluar rumah sakit. Hal ini selain dikarenakan sebagai larangan yang ditetapkan rumah sakit, bahaya asap rokok juga Pak Agus ketahui bagi lingkungan dan orang lain. Perawat hingga karyawan yang bertugas juga dilarang merokok di rumah sakit, karena sudah menjadi tata tertib yang perlu dilaksanakan ketika bekerja. Apabila akan merokok, biasanya mereka melakukannya di warung-warung diluar gedung rumah sakit saat jam makan siang atau jam istirahat.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa semua pihak rumah sakit telah mengusahakan untuk penanggulangan penggunaan rokok di lingkungan rumah sakit.

⁸⁶ Agus, wawancara, (Lumajang, 11 Februari 2021)

Akan tetapi, yang perlu digaris bawahi ialah pihak rumah sakit hanya menegur dan memasang tulisan ‘dilarang merokok’ di beberapa tempat. Hal ini bisa saja tidak efektif karena lingkungan rumah sakit sangat luas. Banyak pasien keluar-masuk dan rawat inap disana. Perlu tindakan tegas yang lebih agar penegakan kawasan tanpa rokok ini bisa dilaksanakan dengan maksimal. Mungkin dengan menambah beberapa petugas keamanan, menginformasikan bagaimana tugas pihak rumah sakit, petugas kebersihan hingga petugas keamanan untuk bisa membantu penegakan kawasan tanpa rokok atau dengan memberikan sanksi tertentu kepada pasien/tamu yang masih merokok di lingkungan rumah sakit atau diluar kawasan khusus merokok meskipun telah ada tulisan/rambu ‘dilarang merokok’. Sanksi yang diberikan bisa beberapa pilihan seperti menraktir semua petugas media hingga medis disana, hukuman fisik seperti push up atau bantuan sosial dengan membantu membersihkan rumah sakit, dan lain sebagainya.

- Laboratorium Klinik Jenggolo Lumajang

Berdasarkan wawancara dengan salah satu petugas laboratorium bernama Bu Intan Pratiwi menjelaskan bahwa di lab tidak ada tulisan ‘dilarang merokok’. Selain dikarenakan ruangan

menggunakan *Air Conditioner*, bagi tamu atau pasien yang akan merokok dipersilahkan merokok diluar gedung laboratorium. Sehingga, tidak pernah ada tamu atau pasien yang merokok di lingkungan laboratorium.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa tindakan tegas dari petugas laboratorium patut diacungi jempol. Namun perlu diketahui bahwa lingkungan laboratorium tidak seluas rumah sakit, pasien yang hadir juga tidak sebanyak seperti di rumah sakit/puskesmas. Sehingga penegakan kawasan tanpa rokok tidak rumit dan bisa terlaksana dengan baik meskipun tidak ditemukan tempat khusus merokok dan tulisan/rambu ‘dilarang merokok’.

b. Tempat Belajar Mengajar

Dalam Tempat Belajar Mengajar ini terdapat tiga sekolah yang menjadi tempat dilakukannya penelitian, yakni MAN Lumajang, MTsN Lumajang dan SDI Tompokersan Lumajang.

- Madrasah Aliyah Negeri Lumajang (MAN Lumajang)

Madrasah Aliyah Negeri Lumajang merupakan salah satu sekolah yang mempertegas larangan merokok di kawasan sekolah. Berdasarkan keterangan dari beberapa guru dan satpam bahwa penertiban sering dilakukan kepada siswa yang ketahuan

⁸⁷ Intan Pratiwi, wawancara, (Lumajang, 11 Februari 2021)

membawa rokok atau merokok di lingkungan sekolah. Pak Malik salah satu guru BK atau Bimbingan Konseling menyebutkan bahwa hal tersebut dilakukan karena siswa masih dibawah umur untuk merokok.⁸⁸ Selain itu, Pak Muizul yakni salah satu guru TU menambahkan bahwa dalam tata tertib sekolah juga terdapat hukuman sendiri berupa poin untuk siswa yang ketahuan membawa rokok atau merokok.⁸⁹ Pak Yono sebagai satpam menjelaskan bahwa guru-guru memilih taman kecil yang berada didekat tempat parkir guru untuk merokok.⁹⁰ Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini tempat khusus yang digunakan untuk merokok ini sesuai seperti didalam peraturan daerah tersebut, dimana tempat khusus tersebut haruslah merupakan tempat terbuka, terpisah dari gedung/tempat/ruang utama/ tempat beraktifitas lainnya, jauh dari pintu masuk dan keluar, jauh dari tempat lalu lalang, dan disediakan tempat puntung rokok. Selain itu, terdapat plang/tanda ‘dilarang merokok’ di tembok sekolah, terutama dipintu masuk sekolah yang diperuntukkan untuk tamu atau wali murid agar tidak merokok di lingkungan sekolah.

⁸⁸ Malik, wawancara, (Lumajang, 12 Februari 2021)

⁸⁹ Muizul, wawancara, (Lumajang, 12 Februari 2021)

⁹⁰ Yono, wawancara, (Lumajang, 12 Februari 2021)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa memang tempat khusus merokok untuk guru telah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Akan tetapi, meski tempat khusus berada diluar gedung sekolah, siapapun yang berada didalam sekolah baik guru ataupun siswa masih bisa melihat bagaimana guru melakukan kegiatan merokok di tempat khusus tersebut. Dikarenakan tempat khusus itu terletak berada dekat kelas dan sangat jelas mampu dilihat oleh siswa-siswi yang melewati kelas. Jelas ini menjadi contoh yang tidak baik karena siswa-siswi bisa menirunya dan memang benar bahwa Pak Malik selaku guru Bimbingan Konseling menyebutkan bahwa sering ditemukan kegiatan merokok oleh siswa-siswa yang dilakukan di kamar mandi.⁹¹ Sering ditemukan puntung rokok juga didalam sana. Sehingga hal yang bisa dilakukan adalah dengan menutup akses siswa-siswi untuk mampu melihat kegiatan merokok yang dilakukan para guru dengan menambah *fiber* pada bagian pagar yang terletak disebelah kelas. Sehingga siswa-siswi yang lalu lalang disana tidak dapat melihat kegiatan merokok yang dilakukan oleh para guru. Selain itu, bagi siswa-siswi yang masih melanggar peraturan/tata tertib

⁹¹ Malik, wawancara, (Lumajang, 11 Februari 2021)

sekolah, bisa dihukum dengan memberikan tanda/kertas dikalungkan kebagian leher bahwa dia telah merokok dan tidak akan mengulangnya atau dengan dihukum berdiri di lapangan sekolah beberapa jam, atau dengan membersihkan masjid sekolah beserta kamar mandinya untuk beberapa hari dengan dipantau oleh guru Bimbingan Konseling.

- Madrasah Tsanawiyah Negeri Lumajang (MTs Negeri Lumajang)

Madrasah Tsanawiyah Negeri Lumajang adalah sekolah tingkat menengah pertama yang letaknya bersebelahan dengan MAN Lumajang. Berdasarkan wawancara dengan guru dan satpam yang bertugas bahwa tidak jauh berbeda dengan MAN Lumajang. MTsN Lumajang juga menetapkan larangan membawa rokok atau merokok berupa poin dalam tata tertibnya untuk dipatuhi oleh siswa-siswi. Berdasarkan keterangan Pak Yadhi sebagai satpam, MTsN Lumajang juga memberikan plang/tanda ‘dilarang merokok’ agar tamu atau wali murid tidak merokok di lingkungan sekolah.⁹² Selain itu, Pak Fajar sebagai guru dan penjaga UKS menyebutkan bagi para guru disediakan tempat khusus merokok yang letaknya bersebelahan dengan ruang guru, tepat didepan ruang guru yang merupakan bagian luar gedung sekolah.⁹³ Tempat

⁹² Yadhi, wawancara, (Lumajang, 12 Februari 2021)

⁹³ Fajar, wawancara, (Lumajang, 12 Februari 2021)

Khusus ini hanya disediakan beberapa tempat duduk dan asbak. Hal ini tidak sesuai dengan syarat yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dimana meskipun letak tempat khusus tersebut berada diluar gedung tapi bersebelahan langsung dengan ruang guru, yang sangat mungkin asap rokok masuk kedalam ruangan. Selain itu, tempat khusus tersebut dekat dengan pintu masuk dan keluar ruang guru dan tempat parkir siswa-siswi yang merupakan tempat lalu lalang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa tempat khusus yang disediakan kurang maksimal, dimana masih merugikan dan membahayakan perokok pasif (orang yang tidak merokok dan menghirup asap rokok), guru lain serta para siswa-siswi. Sehingga seharusnya pihak sekolah bisa membangun tempat khusus yang jauh dari ruang guru dan disesuaikan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok agar dalam implementasinya masyarakat dapat terlindungi terutama ibu hamil dan anak-anak begitu juga lingkungan sekitar. Mungkin dengan cara memberi tempat khusus dekat tempat parkir. Didepan ruang guru terdapat tempat duduk yang biasa digunakan

untuk merokok, yang seperti peneliti jelaskan merupakan tempat khusus merokok yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Didepan tempat duduk tersebut terdapat tempat parkir. Seharusnya tempat duduk agar dipindah pada daerah tempat parkir tersebut, agar nantinya ketika para guru merokok, asap rokok tidak terjangkau hingga ruang guru. Dan sebaiknya para guru juga merokok pada jam-jam tertentu. Apabila dikira merupakan pada saat itu ialah jam istirahat atau jam pulang, maka bisa tidak merokok terlebih dahulu. Karna melihat tempatnya yang terbuka dan sangat mudah menjadi tontonan para siswa-siswi yang lalu lalang disitu. Dan perlu diingat bahwa disebelah ruang guru adalah pintu tempat parkir sepeda para siswa-siswi.

- Sekolah Dasar Islam Tompokersan Lumajang (SDI Tompokersan Lumajang)

Berdasarkan wawancara dengan satpam yang bertugas yakni Pak Roni menyebutkan bahwa sangat jarang ditemukan tamu atau wali murid yang merokok di lingkungan sekolah. Meski telah disediakan tempat khusus merokok, pun jarang digunakan. Tempat Khusus yang dimaksud ini masih berada didalam lingkungan sekolah. Tempat Khusus yang disediakan berupa tempat duduk

dekat tempat parkir yang juga memiliki fungsi sebagai tempat untuk duduk/menunggu bagi wali murid/tamu yang datang. Selain itu, banyak pula wali murid yang sudah paham dan sadar diri untuk tidak merokok di lingkungan sekolah dengan maksud agar tidak memberikan contoh hal buruk kepada anak-anak. Dengan kondisi Covid-19 ini, murid tidak setiap harinya datang ke sekolah, sehingga juga tidak banyak aktifitas terjadi di lingkungan tersebut kecuali para guru yang hadir ke sekolah. Para guru juga memilih untuk merokok di warung diluar sekolah ketika jam makan siang daripada di lingkungan sekolah. Sayangnya, untuk plang/tanda dilarang merokok harus tertutup dengan tanda-tanda peringatan penggunaan masker, *hand sanitizer* atau cuci tangan hingga pamflet untuk mematuhi protokol kesehatan agar mengurangi penyebaran virus Covid-19.⁹⁴

Dari penjelasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tempat khusus yang disediakan di SD Islam Tompokersan Lumajang tidak maksimal. Dimana tempat khusus yang tersedia ialah tempat yang berada pada ruang terbuka, tidak begitu terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas, dekat dari pintu masuk dan keluar (gerbang sekolah), dekat dari tempat orang lalu lalang dan tidak disediakan

⁹⁴ Roni, wawancara, (Lumajang, 12 Februari 2021)

tempat puntung rokok berikut peringatan bahaya rokok. Akan tetapi, baiknya wali murid dan para guru telah sadar diri untuk tidak merokok di lingkungan sekolah. Sehingga sangat jarang ditemukan kegiatan merokok di lingkungan sekolah.

c. Tempat Ibadah

Pada rencana awal, peneliti memilih tiga tempat ibadah, yakni Masjid Al Huda Lumajang, Gereja Kristus Tuhan Halleluyah Lumajang dan salah satu klenteng di daerah Kecamatan Lumajang. Namun, dikarenakan klenteng sedang tutup maka penelitian berada pada dua tempat yakni Masjid Al Huda Lumajang dan Gereja Kristus Tuhan Halleluyah Lumajang.

- Masjid Al Huda Lumajang

Berdasarkan wawancara singkat dengan salah satu bapak yang menjaga masjid bernama Pak Samsul menyebutkan bahwa di lingkungan tidak ada plang/tanda ‘dilarang merokok’. Hal ini dikarenakan hampir tidak ditemukan jamaah yang merokok. Sehingga, tidak diperlukan pemasangan tanda ‘dilarang merokok’ tersebut. Pak Samsul juga menambahkan bila ada jamaah yang merokok untuk diharapkan diluar masjid.⁹⁵

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan merokok tidak ditemukan di lingkungan masjid selain

⁹⁵ Samsul, wawancara, (Lumajang, 12 Februari 2021)

dikarenakan tindakan tegas dari pihak masjid, dikarenakan juga jamaah disana telah paham serta memberikan contoh kepada jamaah yang lain/baru untuk tidak merokok disana. Dan perlu diketahui dalam agama Islam sendiri menyebutkan bahwa merokok merupakan hal yang dilarang karena aromanya dapat mengganggu orang lain, apalagi bagi perokok pasif. Larangan tersebut dianalogikan dengan sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam yakni *“siapa yang memakan bawang putih atau merah, hendaklah ia menjauhi kamu atau menjauhi masjid kami.”* Karena adanya sabda ini, wajar bila sangat jarang ditemukan orang merokok di lingkungan masjid tertentu. Namun perlu diketahui bahwa bawang secara jelas tidak haram untuk dimakan bahkan membawa dampak positif bagi kesehatan apabila dikonsumsi. Akan tetapi, sesuai dengan sabda Rasulullah tadi bahwa pemakannya dilarang untuk mendekati masjid karena masjid merupakan tempat umum. Dan baunya bisa mengganggu jamaah lainnya. Analoginya sama dengan penggunaan rokok, yang dimana asap rokoknya bisa mengganggu proses ibadah jamaah di masjid. Dan hal ini berlaku untuk tempat umum lainnya, terlepas mengganggu kesehatan atau tidak.⁹⁶

⁹⁶ Nurlaila Harun, “Hukum Merokok Menurut Tinjauan Nash dan Kaidah Syar’iyah”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 2015 : 3. <http://dx.doi.org/10.30984/as.v13i2.176>

- Gereja Kristus Tuhan Haleluyah Lumajang

Menurut penjelasan Pak Bayu yakni penjaga gereja sekaligus satpam yang menjaga menjelaskan bahwa ada beberapa tulisan ‘dilarang merokok’ di halaman depan gereja hingga halaman belakang gereja. Jemaat sudah paham untuk tidak merokok didalam bangunan gereja. Pak Bayu menambahkan bahwa biasanya jemaat merokok dibagian samping bangunan gereja, karena disitu terdapat tempat duduk dan dekat tempat parkir. Namun tidak disediakan meja dan asbaknya.⁹⁷

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa para jemaat telah mempraktekkan dengan baik dan benar bahwa rokok tidak sebaiknya digunakan saat beribadah di gereja. Bahkan Pak Bayu menjelaskan betapa memang terlarangnya bagi siapapun yang merokok didalam bangunan gereja. Sehingga bagi jemaat yang merokok haruslah keluar gedung dan bisa merokok pada tempat duduk yang tersedia di lingkungan bangunan gereja. Ketika peneliti melihat sekeliling, bahkan tanda/tulisan ‘dilarang merokok’ yang terbuat dari *banner* telah memudar hingga hampir tidak tampak tulisannya. Jika tanpa melihat tulisan tersebut jemaat mengerti dimana dan kapan ia harus merokok, maka peneliti dapat simpulkan bahwa jemaat telah paham betul apa yang harus mereka

⁹⁷ Bayu, wawancara, (Lumajang, 12 Februari 2021)

lakukan ketika merokok tanpa harus mengganggu jemaat yang lain dan tetap bisa melanjutkan keperluan dirinya sendiri.

d. Angkutan Umum

Angkutan Umum yang biasa digunakan oleh masyarakat Lumajang adalah bus dan mikrolet. Sehingga untuk penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di angkutan umum bus dan mikrolet.

- Bus

Bus terdapat dua macam yakni Bus Patas dan Bus Ekonomi. Ongkos Bus Patas lebih mahal dari Bus Ekonomi, dikarenakan bus menggunakan *Air Conditioner*, kualitas busnya lebih baik daripada Bus Ekonomi, Bus Patas juga untuk perjalanan keluar kota menggunakan jalur tol, sehingga waktu sampai tujuan lebih cepat sejam dari Bus Ekonomi. Bus Patas juga akan mengantar penumpang dari satu terminal ke terminal yang dituju sesuai daerah tujuan bus. Berdasarkan observasi tempat, tidak ditemukan sopir atau kondektur dari Bus Patas merokok didalam bus saat sebelum atau ketika bus melaju. Berbeda dengan Bus Patas, Bus Ekonomi biaya perjalanannya lebih murah, penumpang juga tidak harus turun di terminal, ongkos biaya perjalanan disesuaikan penumpang akan turun dimana. Akan tetapi, Bus Ekonomi juga sering menampung penumpang meskipun kursi telah penuh.

Berdasarkan observasi, kebanyakan sopir, kernet, hingga penumpangnya merokok didalam bus, saat sebelum berangkat hingga saat bus melaju. Pada Bus Ekonomi juga tidak ada peringatan akan bahaya atau larangan merokok. Padahal bila melihat penumpangnya, juga terdapat anak-anak, ibu hamil hingga orang lanjut usia. Asap rokok juga mengganggu pernapasan bagi penumpang yang lainnya, tapi bentuk peringatan yang meminta agar rokok dimatikan terlebih dahulu kepada salah satu penumpang bapak tua dihiraukan begitu saja.

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam angkutan umum bus terutama Bus Ekonomi ini lebih kecil rasa toleransi yang dimiliki penumpangnya. Karena memang biaya tarif busnya lebih murah, penumpang pun semena-mena. Padahal bila ditilik kembali, penumpang pada Bus Ekonomi jauh lebih penuh daripada Bus Patas yang seharusnya dengan bus dengan isi penuh tersebut membutuhkan sirkulasi udara yang mencukupi juga. Akan tetapi, Bus Ekonomi adalah bus yang tidak memiliki *Air Conditioner* sehingga sirkulasi udaranya kecil, ditambah lagi dengan beberapa orang yang merokok didalamnya menjadikan udara pengap didalam bus. Dan lucunya ketika orang-orang tersebut diperingatkan, justru mereka balik memarahi kami seakan-akan

mengganggu kegiatan khidmat mereka. Hal ini terus menerus terjadi hingga menjadi budaya yang tidak pernah lepas ketika melakukan perjalanan dengan menggunakan Bus Ekonomi. Kali ini peneliti juga melihat, mengerti dan merasakan bahwa apabila pribadi dari tiap orang tidak merasakan kenyamanan ketika menumpangi Bus Ekonomi, maka otomatis mereka memilih Bus Patas yang dimungkinkan kenyamanannya lebih baik, ada *Air Conditioner*, tidak mengkhawatirkan gangguan-gangguan seperti pengamen, asap rokok dan lain-lain, dan pastinya bisa menikmati perjalanan dengan tenang meskipun harus mengeluarkan jumlah uang yang lebih banyak.

- Mikrolet Antar Kecamatan

Mikrolet Antar Kecamatan ada beberapa macam. Untuk yang beroperasi di daerah Kecamatan Sukodono dan Lumajang, mobil berwarna merah maroon dan ukurannya seperti ukuran mikrolet pada umumnya bermerk *Suzuki Carry*. Mikrolet ini merupakan angkutan kota yang terhubung dari Terminal Minak Koncar Lumajang dengan kawasan perkotaan seperti Sukodono dan Lumajang.⁹⁸ Masyarakat Lumajang biasa menyebutkan dengan 'lin'. Untuk mikrolet yang beroperasi antar kecamatan selain

⁹⁸ Wikipedia, "Terminal Minak Koncar", *Wikipedia*, 29 Desember 2020, diakses 3 Mei 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal_Minak_Koncar#cite_note-0-7

Kecamatan Lumajang biasa ditemukan didaerah Pasar Lumajang yang disana terdapat Terminal MPU (Mobil Penumpang Umum) tempat mikrolet ini ditemukan. Sedangkan mikrolet satu ini adalah angkutan pedesaan yang terhubung dari pusat kota yakni Terminal MPU (Mobil Penumpang Umum) dengan kawasan pedesaan di Lumajang seperti Gucialit, Senduro, Candipuro, serta Kunir.⁹⁹ Ukuran mobil juga lebih besar dari mikrolet Antar Kecamatan Lumajang, mobil yang digunakan adalah mobil merk *Isuzu ELF*. Ukuran mobil ini besar dikarenakan biasa mengantar penumpang dari pasar yang membawa banyak barang dan besar seperti Pisang Agung, kelapa satu karung dan barang lainnya untuk dijual lagi oleh penumpang didaerah rumah mereka.

Berdasarkan observasi, didalam mikrolet ini, sopir dan kernet masih merokok didalam mobil. Padahal hal itu bisa mengganggu penumpang yang lain dengan asapnya. Meskipun penumpang merasakan ketidaknyamanan, hal ini tidak mempengaruhi sopir atau kernet untuk mematikan rokoknya. Selain itu, juga tidak ada peringatan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang terkait larangan merokok ini. Larangan merokok hanya ditemukan di beberapa tempat yang berada didalam terminal karena ruangnya menggunakan *Air Conditioner*.

⁹⁹ Ibid.

e. Ruang Kerja

- Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang

Berdasarkan wawancara dengan Plt. Kasubag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Fira Yofiana menjelaskan bahwa setelah Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok disahkan, semua pegawai menaati peraturan tersebut dengan baik. Mungkin sekitar 3 bulan semua menjalankan poin dalam peraturan tersebut dengan baik.¹⁰⁰ Padahal dalam halaman Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang telah disediakan tempat khusus untuk merokok didekat tempat parkir. Terdapat juga tanda/rambu ‘dilarang merokok’ di beberapa tempat seperti di tempat parkir, di pintu masuk kantor, dan beberapa tempat dimana dekat dengan ruang kerja dan tempat lalu lalang. Akan tetapi, setelah 3 bulan menaati peraturan daerah tersebut, pegawai mulai merokok di sembarang tempat seperti di tangga yang sering digunakan lalu lalang banyak orang atau depan ruang Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. Tangga tempat lalu lalang ini bahkan merupakan tempat yang kedap udara, sering digunakan pegawai Bagian Hukum untuk

¹⁰⁰ Fira Yofiana, wawancara, (Lumajang, 23 November 2020)

memberikan berkas atau Surat Keterangan Bupati yang dibuat untuk diberikan pada bagian Administrasi di lantai satu. Bu Fira menjelaskan bahwa hal yang menyebabkan pegawai hanya menaati peraturan tersebut 3 bulan dikarenakan memang tidak ada penegakan didalam kantor sehingga berdampak pegawai mengabaikan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok karena dirasa masih aman untuk merokok didalam kantor. Alasan lain yang mengakibatkan penegakan tidak dijalankan dikarenakan tidak ada perintah dari penanggungjawab yakni Bupati kepada Tim Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok melalui Surat Keputusan Bupati Lumajang. Sehingga penegakan didalam kantor ataupun diluar juga tidak terlaksana. Dan perlu diketahui bahwa sebelum Surat Keputusan Bupati ini turun, perlu dibentuk Peraturan Bupati yang menjelaskan lebih detail terkait Kawasan Tanpa Rokok. Akan tetapi, hingga bulan terakhir penelitian yakni bulan Februari 2021, peneliti tidak bisa mengakses peraturan bupati tersebut di *website* JDIH Lumajang sehingga diperlukan wawancara lebih lanjut lagi dan alhasil peneliti memperoleh *softfile* Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.¹⁰¹

Sebelum disahkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, pemerintah memiliki beberapa masalah pada lima tahun sebelumnya yang dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lumajang saat itu menolak rancangan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini. Dengan alasan bahwa nantinya mereka tidak memiliki kebebasan dalam merokok di kantor dan lain sebagainya. Sedangkan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sebagai pelopor dalam perancangan peraturan daerah ini merasa hal ini sangat penting untuk dibahas, dirancang dan disahkan peraturannya demi kebaikan masyarakat Lumajang kedepannya yang dirasa semakin hari semakin banyak juga kasus merokok tanpa pandang usia, tempat dan waktu. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang juga memandang bagaimana dampak yang diakibatkan dari rokok tersebut bagi kesehatan fisik hingga lingkungan. Dengan masalah yang ada tersebut, pemerintah pun tidak tinggal diam dan berinisiatif untuk membentuk peraturan bupati terlebih dahulu untuk tetap bisa mengatur masyarakat Lumajang agar tidak semena-mena ketika merokok dan dapat mengurangi kegiatan

¹⁰¹ Fira Yofiana, wawancara, (Lumajang, 15 Maret 2021)

merokok sebisa mungkin. Peraturan Bupati ini dilanjutkan dengan turunnya Surat Keputusan Bupati pada tahun 2016. Seiring berjalannya waktu, ketika pergantian bupati dan pergantian separuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lumajang dengan anggota baru dan masih muda, Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang memanfaatkan hal ini untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Hingga tepat pada Juli 2019, peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini pun disahkan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Lalu tepat pada bulan maret tahun 2020, Indonesia dihadapkan dengan kasus Covid-19 sehingga segala aktivitas hingga kebijakan pemerintah terfokuskan dalam penanganan Covid-19 ini. Sehingga setelah disahkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini belum disahkan peraturan bupati yang baru yang didalamnya tidak memiliki banyak perbedaan dengan peraturan bupati sebelumnya. Karena lamanya disahkan peraturan bupati ini, maka tidak ada penegakan hukum bagi pelanggar kawasan tanpa rokok karena penjelasan terkait Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok disebutkan didalam peraturan bupati. Hal inilah menjadi sebab mengapa di lingkungan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten

Lumajang dan Sekretariat Daerah Lumajang tetap melakukan kegiatan merokok setelah 3 bulan pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peneliti menyimpulkan bahwa karena rentetan kejadian yang terjadi dekat ini menjadi salah satu alasan dibalik lambatnya penegakan hukum di Kabupaten Lumajang. Pemerintah juga dialihkan fokusnya pada penanganan Covid-19 yang hingga bulan Mei 2021 ini masih meresahkan seluruh penduduk di dunia tidak terkecuali Indonesia.

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lumajang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lumajang ialah instansi pemerintah lainnya selain Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. Selama peneliti melakukan observasi disana, tidak ditemukan tanda/rambu bertuliskan ‘dilarang merokok’. Bahkan ditemukan banyak bapak-bapak merokok didalam ruangan. Akibatnya, ruangan pun dipenuhi dengan asap rokok dimana-mana. Berdasarkan keterangan dari Bapak Dimas, salah satu pegawai muda disana menyebutkan bahwa memang menjadi kebiasaan bagi pegawai

kantor (Bakesbangpol) yakni bapak-bapak untuk merokok di waktu senggang dan berbincang-bincang dengan sesama rekan.¹⁰²

Peneliti menyimpulkan bahwa seharusnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bagian dari pemerintah menjalankan poin penting dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 dengan baik. Dengan tidak ditemukannya tanda/plang ‘dilarang merokok’ dan masih sering ditemukannya kegiatan merokok didalam ruangan yang merupakan ruang kerja, membuktikan bagaimana kurangnya kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap kesehatan pegawai dan lingkungan, terlebih hal ini membuktikan kurangnya kinerja Bakesbangpol dalam menjalankan poin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019. Seharusnya dengan telah disahkannya peraturan daerah ini, minimal masih ditemukannya tulisan/plang ‘dilarang merokok’ meskipun masih ditemukan kegiatan merokok didalamnya. Akan tetapi, pada faktanya tidak demikian. Sehingga hal ini sangat disayangkan dan semoga kedepannya bisa dibuat tempat khusus untuk merokok terpisah dari gedung, berada diluar terbuka, tidak berada pada tempat lalu lalang, tidak berada pada tempat keluar-masuk dan disediakan asbak disana. Hal ini selain untuk membuat udara yang segar dan

¹⁰² Dimas, wawancara, (Lumajang, 12 Maret 2021)

nyaman di ruang kerja/kantor, juga dapat melindungi pegawai khususnya yang tidak merokok untuk mendapatkan udara yang segar yang sudah seharusnya menjadi hak mereka.

- Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang merupakan instansi yang mempelopori pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sadar betul bagaimana bahaya rokok pada kesehatan manusia hingga kesehatan lingkungan. Dirasa dengan semakin banyak ditemukan rokok dimana-mana, bahkan anak-anak juga mudah mendapatkannya, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang mengusulkan peraturan tersebut. Dengan panjangnya proses dan beberapa penolakan dari berbagai kalangan, maka dibentuk terlebih dahulu Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok untuk menjadi peraturan sementara sebelum dibentuknya peraturan daerah. Sehingga, Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sangat ketat dalam hal rokok ini. Dalam Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang ditemukan tulisan/rambu ‘dilarang merokok’ yang sangat besar di pos satpam. Dimana hal ini menjadikan pegawai/tamu yang datang dapat

melihat dengan jelas tanda tersebut. Berdasarkan penjelasan dari satpam bernama Bapak Rudi menyebutkan sudah menjadi kewajiban bagi siapapun yang memasuki lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang untuk menaati peraturan dengan baik terlebih terkait dilarang merokok. Bahkan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sengaja tidak disediakan tempat khusus untuk merokok agar tidak memberi kesempatan siapapun untuk merokok, apalagi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.¹⁰³

Peneliti menyimpulkan bahwa sama halnya dengan Puskesmas Rogotrungan Kecamatan Lumajang, tanpa dibuatnya tempat khusus merokok, larangan merokok ditaati dengan baik oleh pegawai/tamu yang berada di Dinas Kesehatan Lumajang. Ketatnya peraturan dan penegakan yang diterapkan di Dinas Kesehatan Lumajang ini menjadikan jarang bahkan tidak pernah ditemukan kegiatan merokok disana. Sehingga peneliti mampu menangkap bahwa meski tidak terdapat tulisan/plang ‘dilarang merokok’, dengan tindakan tegas yang diberikan dari instansi atau tempat kerja yang masuk dalam lingkup kawasan tanpa rokok, maka penegakan hukum bagi pelanggar kawasan tanpa rokok tetap

¹⁰³ Rudi, wawancara, (Lumajang, 12 Februari 2021)

bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu Satpol PP sebagai satuan penegak kawasan tanpa rokok untuk bertindak.

f. Tempat Bermain

- *Play Ground* Alun-Alun Kota Lumajang

Dalam lingkungan Taman Bermain tidak ditemukan adanya tulisan/tanda ‘dilarang merokok’. Dikarenakan taman bermain ini yang letaknya menjadi satu dengan Alun-Alun Kota Lumajang, maka dimungkinkan banyak ditemukan kegiatan merokok didalam tempat tersebut karena dekat dengan tempat umum. Dengan tidak adanya tanda ‘dilarang merokok’ menjadikan celah bagi siapapun untuk merokok karena tidak ditemukannya tanda yang melarang merokok. Berdasarkan penjelasan dari petugas kebersihan taman bermain dan Alun-Alun Kota Lumajang bernama Bapak Heri menyebutkan bahwa banyak ditemukan kegiatan merokok dikarenakan Alun-Alun Kota Lumajang merupakan tempat umum. Namun, untuk didalam *Play Ground* tidak diperbolehkan ada kegiatan merokok.¹⁰⁴ Bapak Kholil menambahkan bahwa hal tersebut diakibatkan taman bermain adalah area bermain anak. Jikalau masih ada pihak yang melanggar akan diketahui dari karpet dibawah taman bermain. Karena karpet tersebut dapat mengidentifikasi adanya serpihan abu rokok yang rontok dari

¹⁰⁴ Heri, wawancara, (Lumajang, 12 April 2021)

puntungnya jatuh ke karpet. Meskipun tidak ada tanda ‘dilarang merokok’, petugas bersih-bersih selalu mengingatkan para pengunjung atas peraturan tidak tertulis tersebut. Pak Kholil menyebutkan bahwa yang melanggar akan diberi denda tertentu.¹⁰⁵ Untuk selain di area taman bermain, sering ditemukan adanya puntung rokok. Hal ini dikarenakan taman bermain dan Alun-Alun Kota Lumajang dekat dengan pedagang berjualan dan warga yang biasa menghabiskan waktu disana. Akan tetapi, dikarenakan pandemi Covid-19 ini, taman bermain dan Alun-Alun Kota Lumajang ditutup. Ada beberapa akses kecil untuk bisa masuk, namun dengan ditutupnya taman bermain dan Alun-Alun Kota Lumajang ini, mampu mengurangi warga untuk memasukinya.¹⁰⁶

Dengan ini, peneliti menyimpulkan bahwa meskipun Taman Bermain ini terletak satu lingkungan dengan Alun-Alun Kota Lumajang yang merupakan tempat umum, petugas kebersihan mampu menjalankan peraturan tidak tertulis dengan baik. Berdasarkan penjelasan petugas kebersihan, jarang ditemukan kegiatan merokok didalam Taman Bermain ini. Hal ini dikarenakan petugas kebersihan selalu memperingati para bapak yang menemani anaknya untuk bermain di Taman Bermain agar

¹⁰⁵ Kholil, wawancara,(Lumajang, 12 April 2021)

¹⁰⁶ Syu'aib, wawancara, (Lumajang,12 Februari2021)

tidak merokok. Selain dikarenakan adanya denda tertentu, merokok di Taman Bermain sangat dilarang karena Taman Bermain merupakan tempat untuk bermain anak-anak. Dan memang seharusnya anak-anak dijauhkan dari asap rokok. Bukan hanya anak-anak, tapi asap rokok dijauhkan dari para perokok pasif (orang yang tidak merokok tapi ikut menghirup asap rokoknya). Sehingga peneliti disini sangat mengapresiasi dan menghargai upaya yang dilakukan petugas kebersihan untuk kebaikan dan kenyamanan bersama dan kesehatan lingkungan. Meskipun pasti diketahui bahwa karena Taman Bermain dekat dengan tempat umum, pasti beberapa kali tetap ditemukan pelanggar kawasan tanpa rokok atau bapak-bapak yang tidak bisa diberi peringatan, namun dikarenakan sudah menjadi tugas pekerjaan maka petugas kebersihan menjalankan dan menaati peraturan tidak tertulis tersebut semaksimal mungkin.

g. Tempat Umum dan Tempat Lain yang Ditentukan

- Pom Bensin/SPBU Pertamina 54.673.12

Berdasarkan penjelasan dari salah satu petugas Pom Bensin/SPBU Pertamina 54.673.12 yang terletak di Kecamatan Sukodono bernama Indah menyebutkan bahwa sangat dilarang merokok di lingkungan pom bensin. Bila ditemukan ada petugas yang

melanggar peraturan maka akan langsung diberi tindakan tegas oleh atasan. Bu Indah juga menambahkan bahwa petugas juga perlu memperingatkan kepada pengunjung pom bensin untuk tidak merokok di lingkungan pom bensin.¹⁰⁷ Hal ini membahayakan dikarenakan rokok sendiri mampu memicu atau menyebabkan kebakaran. Perlu diingat bahwa pom bensin tempat dimana bahan bakar berada. Bahan bakar seperti bensin ialah bentuk bahan bakar yang diperoleh dari hasil pemurnian minyak bumi yang didalamnya terdapat unsur *carbon* dan *hydrogen*. Adapun sifat-sifat utama bensin ialah sebagai berikut: a. mudah menguap pada suhu biasa; b. tidak berwarna, jernih dan berbau merangsang; c. titik nyala rendah; d. berat jenis rendah; e. melarutkan minyak dan karet; f. menghasilkan panas yang besar; dan g. meninggalkan sedikit sisa karbon.¹⁰⁸

Dengan beberapa sifat yang dimiliki bahan bakar, dapat disimpulkan bahwa sangat wajib dijauhkan dari hal yang memicu kebakaran seperti korek, rokok, handphone dan lainnya. Banyak ditemukan kasus-kasus pom bensin kebakaran yang sekiranya terjadi kebakaran, yang dihasilkan adalah kebakaran yang sangat besar. Seperti kasus kebakaran hebat yang terjadi di Stasiun

¹⁰⁷ Intan, wawancara, (Lumajang, 12 Februari 2021)

¹⁰⁸ Andreas Surjaka, *Pengaruh Kadar Campuran Bahan Bakar Pada Efisiensi Motor Bensin*, (Skripsi Fakultas Non-Gelar Teknologi, 1989)

Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Desa Jumbleng, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada bulan Desember 2019. Hal ini diawali dari minibus dengan plat nomor E 1286 YL mengisi bahan bakar jenis *pertalite* menggunakan jeriken. Usai mengisi bahan bakar, minibus tersebut terparkir di area SPBU. Dengan seketika api langsung membakar kendaraan yang membawa jeriken berisi bahan bakar tersebut. Dari hasil pemeriksaan saksi, diduga bahwa sopir minibus merokok setelah mengisi bahan bakar di jeriken tersebut. Si sopir juga melarikan diri, beruntung tidak ada korban jiwa.¹⁰⁹ Dengan ini menjadikan contoh bagaimana dampak rokok saat digunakan di SPBU akan langsung terasa dampaknya. Maka dari, perlu kerjasama dari pihak SPBU dengan pegawai untuk mengingatkan dan memperingati pengunjung SPBU agar dapat menaati peraturan demi kesehatan dan keselamatan bersama.

- Rumah Makan Kemayoran Lumajang

Menurut kesaksian dari juru parkir Rumah Makan Kemayoran Lumajang bernama Bapak Yudi menjelaskan bahwa baik diluar ataupun didalam rumah makan tidak tanda ‘dilarang merokok’. Beliau menambahkan pula bahwa kegiatan merokok juga sering

¹⁰⁹ Sudirman Wamad, “Sopir Diduga Merokok Usai Isi Bensin Minibus Terbakar di SPBU Indramayu”, *detiknews*, 18 Desember 2019, diakses 3 Mei 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4827381/sopir-diduga-merokok-usai-isi-bensin-minibus-terbakar-di-spbu-indramayu>

ditemukan didalam ataupun diluar rumah makan setelah makan di rumah makan tersebut.¹¹⁰

Melihat bagaimana keadaan di Rumah Makan Kemayoran ini, peneliti menyimpulkan bahwa rumah makan ini tidak menerapkan poin penting yang berada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019. Meskipun rumah makan ini termasuk tempat umum, seharusnya pihak rumah makan menyediakan tempat untuk pelanggan yang akan merokok diluar bangunan. Jika pelanggan justru merokok dalam satu tempat yang sama dengan pelanggan lain yang tidak merokok, hal ini justru akan mengganggu sirkulasi udara didalam bangunan tersebut. Apalagi jika didalam bangunan tersebut terdapat pelanggan berupa ibu hamil hingga anak-anak. Hal ini sangat disayangkan terjadi karena perokok membiarkan orang lain sebagai perokok pasif untuk menghirup udara yang tidak segar dan bahkan bisa menyesakkan.

- Graha Mulia Plaza Lumajang

Baik didalam ataupun diluar bangunan Graha Mulia Plaza Lumajang tidak ditemukan tanda/tulisan 'dilarang merokok'. Berdasarkan penjelasan dari salah satu satpam bernama Bapak Adi menjelaskan bahwa memang tidak ada tanda 'dilarang merokok'

¹¹⁰ Yudi, wawancara, (Lumajang, 12 Februari 2021)

didalam ataupun diluar bangunan. Akan tetapi, masyarakat seakan paham dengan situasi dan keadaan disana sehingga sangat jarang ditemukan ada yang merokok didalam bangunan kecuali dibagian balkon bangunan. Karena bagian balkon diperuntukkan bagi masyarakat yang sedang bersantai atau makan setelah lelah berbelanja. Balkon tersebut juga dibatasi dengan kaca sehingga memisahkan bagian dalam bangunan dengan bagian luar balkon.¹¹¹

Dengan ini peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat telah paham dimana sebaiknya mereka merokok. Setelah dilakukannya observasi dan wawancara, memang tidak ditemukan kegiatan merokok didalam Graha Mulia Plaza kecuali di tempat makan yang tersedia balkonnya. Pada balkon-balkon tersebut baru ditemukan ada beberapa orang merokok disana. Melihat hal ini, masyarakat mengerti dan memilih tempat yang berhadapan langsung dengan luar ruang agar asap rokok tidak mengepul didalam bangunan Graha Mulia Plaza. Hal ini merupakan hal baik yang seharusnya bisa dipraktekkan ditempat-tempat umum lainnya atau bahkan tempat lain yang masuk dalam lingkup kawasan tanpa rokok.

Melalui hasil penelitian yang dimiliki, peneliti mengklasifikasi data yakni sebagai berikut:

¹¹¹ Adi, wawancara, (Lumajang, 12 Februari 2021)

- a. Tempat-tempat yang memiliki tulisan larangan merokok
 - Terdapat tulisan larangan merokok dan dipatuhi oleh masyarakat seperti yang terjadi di Puskesmas Rogotrunan Kecamatan Lumajang, Laboratorium Klinik Jenggolo Kabupaten Lumajang, Dinas Kesehatan Kecamatan Lumajang, MAN Lumajang, MTsN Lumajang, SDI Tompokersan Lumajang, Gereja Kristus Tuhan Halleluyah Lumajang dan Pom Bensin/SPBU Pertamina 54.673.12.
 - Terdapat tulisan larangan merokok, tapi peraturan tidak dipatuhi oleh masyarakat seperti yang terjadi di Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Tempat-tempat yang tidak memiliki tulisan larangan merokok seperti Angkutan Umum (bus, angkot), Graha Mulia Plaza Lumajang, dan Rumah Makan Kemayoran Lumajang.
- c. Tempat yang menyediakan Tempat Khusus Merokok yakni Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, MAN Lumajang, MTsN Lumajang, SDI Tompokersan Lumajang, Gereja Kristus Tuhan Halleluyah Lumajang dan *Play Ground* Alun-Alun Kota Lumajang.
- d. Tempat yang tidak menyediakan Tempat Khusus Merokok yakni Dinas Kesehatan Lumajang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

Puskesmas Rogotruman Kecamatan Lumajang, Laboratorium Klinik Jenggolo Kabupaten Lumajang, Pom Bensin/SPBU Pertamina 54.673.12, Graha Mulia Plaza Lumajang, Rumah Makan Kemayoran Lumajang, Angkutan Umum (bus, angkot) dan Masjid Al Huda Lumajang.

- e. Peneliti menyimpulkan bahwasanya pelaksanaan dari peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok telah berjalan. Namun, belum berjalan secara maksimal. Faktor penyebabnya akan dijelaskan dibawah pada faktor penghambat. Berdasarkan keterangan para responden menyebutkan bahwa memang peraturan tentang larangan penggunaan rokok pada kawasan tanpa rokok telah berjalan meskipun belum secara maksimal dilakukan. Keterangan lebih lengkap terkait penyebab kurang maksimalnya pelaksanaan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok akan dijelaskan pada faktor penghambat dibawah.
- f. Pemberian sanksi
 - Pada Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diberi sanksi administratif yakni sebagai berikut:

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis;
- 3) Penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan/atau
- 4) Pelarangan mengiklankan produk tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.¹¹²

Hal ini juga berlaku kepada pimpinan/penanggung jawab yang tidak menjalankan kewajibannya, sanksi lebih lanjut dijatuhkan melalui Peraturan Perundang-Undangan tentang Disiplin Pegawai dan sanksi berlaku kepada orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual serta membeli rokok di tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

- Sanksi juga diberikan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 yang berisi menggunakan mesin layanan mandiri; kepada siswa atau anak dibawah usia delapan belas tahun; dan kepada perempuan hamil, maka terancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau membayar denda maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Sanksi yang terjadi di tempat yang disebutkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok tunduk pada peraturan yang berada disesuaikan

¹¹² Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

tempatnyanya. Dan pimpinan tempat tersebut menjadi penanggungjawabnya.

3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

a. Faktor Sosial dan Budaya

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, peneliti dapat diketahui salah satu faktor yang mempengaruhi terhambatnya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam implementasinya. Salah satu faktornya adalah faktor sosial dan budaya. Masyarakat Lumajang masih kental dalam penggunaan rokoknya. Sebagaimana diketahui bahwa peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok telah dibentuk sejak tahun 2019, sehingga peran pemerintah dalam menanggulangi penggunaan rokok seharusnya sudah sampai di telinga masyarakat. Ditambah dengan beberapa tempat telah banyak ditemukan adanya tanda/tulisan ‘dilarang merokok’ yang seharusnya sudah dapat dilihat dan dipahami bahwa ada beberapa tempat yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk merokok. Akan tetapi, seperti hasil wawancara yang telah peneliti simpulkan diatas bahwa ada banyak tempat juga yang tidak maksimal pelaksanaannya bahkan tidak

menjalankan poin penting dalam peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dengan baik. Peran masyarakat juga penting disini, dimana seharusnya mereka menaati peraturan yang ada disesuaikan dimana mereka berada. Akan tetapi, hal ini tidak sepenuhnya menjadi salah masyarakatnya, kemungkinan dikarenakan mereka tidak mengetahui secara detail terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini. Pemerintah juga seharusnya memberikan contoh yang baik terutama dari pihak Aparatur Sipil Negara, gencar melakukan sosialisasi di penjuru daerah Kabupaten Lumajang, mengajak anak muda hingga para bapak/ibu untuk bersama menjalankan poin penting dalam peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini demi kesehatan, kenyamanan dan keselamatan bersama.

Meskipun tujuan utama pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok agar bisa menurunkan angka penggunaan rokok di daerah Kabupaten Lumajang, akan tetapi tidak ada didalam peraturan daerah yang menyebutkan kepada masyarakat untuk benar-benar berhenti merokok. Justru didalam peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok hanya memberi batasan dan tempat khusus bagi perokok agar mereka yang tidak merokok tetap bisa beraktivitas dengan baik tanpa ada gangguan seperti adanya asap rokok yang mampu membuat udara

kotor dan susah bernapas. Perlu penyampaian dengan baik hal ini agar masyarakat tidak menelan mentah-mentah informasi dan poin penting yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Sehingga faktor ini menjadi salah satu faktor yang menghambat proses berjalannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok secara maksimal. Karena peraturan daerah juga tidak bisa berjalan dengan baik apabila masyarakatnya tidak lebih memperhatikan dan menjalankan peraturan tersebut dengan baik. Bila tidak dijalankan, maka apa gunanya dibentuknya suatu peraturan untuk mengatur masyarakatnya? Dan jika masyarakat meminta agar pemerintah membuat peraturan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, justru hal ini sangatlah dibutuhkan. Karena penggunaan rokok ini sudah cukup meresahkan, bahkan banyak orang dewasa yang telah mengajari anak kecil untuk merokok padahal belum saatnya bagi mereka untuk merokok. Maka dari itu, hal ini sangat disayangkan dan berharap dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini akan semakin berjalan secara maksimal kedepannya.

b. Faktor Regulasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang

Salah satu faktor lain yang mempengaruhi lambatnya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah regulasi pemerintah. Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai salah satu pihak perancang dan pembentuk peraturan daerah, sayangnya tidak secara cepat menghasilkan peraturan bupati setelah disahkannya peraturan daerah. Padahal, penjelasan lebih lengkap dan penting berada didalam peraturan bupati tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak bisa dipungkiri juga karena para pegawai harus teralihkan fokusnya selama beberapa bulan karena adanya pandemi Covid-19. Bukan hanya pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang saja tapi seluruh Indonesia bahkan sedunia. Untuk itu mengapa peraturan bupati baru disahkan pada tahun 2021.

Selain itu, peneliti melihat bahwa peran pemerintah belum secara menyeluruh sampai kepada masyarakat. Karena sejatinya seharusnya semua pihak pemerintah baik pemerintah kabupaten hingga desa, badan/dinas hingga instansi yang lain menerapkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dengan baik. Mereka sebagai Aparatur Sipil Negara memberikan contoh yang baik bagi

masyarakat. Dengan harapan, masyarakat juga ikut tidak merokok di kawasan tanpa rokok kecuali di tempat yang disediakan.

Namun, untuk beberapa tempat seperti Puskesmas Rogotruran Kecamatan Lumajang dan Laboratorium Jenggolo Lumajang adalah dua tempat yang melaksanakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dimana secara ketat melarang penggunaan rokok dengan tegas. Bahkan, tidak menyediakan tempat khusus untuk tamu/pasien yang hadir. Sehingga, tidak terjadi kegiatan merokok di tempat tersebut. Para pegawai juga selalu mengingatkan dengan tegas peraturan yang terdapat di tempat kerja mereka. Karena terkait sanksi bagi pelanggarnya menjadi tanggung jawab bagi pimpinan dari tempat kawasan tanpa rokok tersebut.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Melalui hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa beberapa tempat tidak memiliki tempat khusus untuk merokok, baik berbentuk ruangan atau halaman sendiri untuk merokok. Kantor Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah salah satu yang menyediakan tempat khusus merokok. Hanya saja tempat tersebut tidak memiliki alat untuk mem-*filter* asap rokok yang dikeluarkan, sehingga ketika rokok dihisap dan ditiup, asapnya memenuhi satu ruangan dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi para perokok. Selain itu, tidak

ditemukan tempat duduk yang nyaman untuk ditempati karena kursi yang disediakan terlalu kaku untuk para perokok yang ingin duduk santai dan nyaman. Juga, ruangan yang kecil berukuran 1x1,5 meter menjadi salah satu hal yang menyebabkan para aparatur sipil di Kantor Pemerintah Kabupaten Lumajang enggan menggunakan fasilitas tersebut.

C. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti telah melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang ikut beraktivitas dan bekerja di tempat-tempat yang termasuk dalam Kawasan Tanpa Rokok sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Selanjutnya, peneliti perlu meninjau hasil penelitian diatas dengan menggunakan Teori *Maqashid Syari'ah*. Dari hasil penelitian diatas, beberapa tempat telah melaksanakan poin penting dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Akan tetapi juga banyak yang tidak melaksanakan poin tersebut dengan baik. Sedangkan

menurut agama Islam, merokok merupakan sesuatu yang haram karena banyaknya *kemudhorotan* yang ada didalamnya. Sehingga penting bagi seluruh umat muslim bahkan seluruh umat manusia untuk tidak merokok, terutama wanita hamil, anak-anak dan larangan merokok di tempat umum.

Dalam agama Islam, perbincangan tentang rokok tidak pernah ada habisnya dibahas. Banyak orang menyebutkan hukumnya makruh, mubah hingga haram. Berdasarkan pandangan ulama Syafi'iyah seperti Ibnu 'Alaan didalam kitab *Syarh Riyadhis Sholihin* dan *Al Adzkar* serta buku-buku beliau yang lain menjelaskan bahwa hukum rokok adalah haram. Ulama lain seperti Asy Syaikh 'Abdur Rahim Al Ghozi, Ibrahim bin Jam'an serta ulama Syafi'iyah yang lain juga beranggapan demikian.¹¹³

Seorang ulama bermazhab Syafi'i bernama Qalyubi pernah berkata dalam kitab *Hasyiyah Qalyubi ala Syarh Al Mahalli*, jilid I, hal. 69, bahwa:¹¹⁴ “Ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram dikonsumsi. Oleh karena itu, para Syaikh kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit berbahaya.”

Penggunaan rokok yang marak terjadi di Indonesia, lebih tepatnya di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menimbulkan keresahan. Dimana Dinas Kesehatan Lumajang pun turut prihatin akan hal ini. Penggunaan rokok

¹¹³ Beni Adri Yassin, “Rokok itu Haram”, *Perpustakaan Universitas Andalas*, 9 Desember 2019, diakses 4 Mei 2021, <https://pustaka.unand.ac.id/component/k2/item/215-rokok-itu-haram>

¹¹⁴ Ibid.

dengan tidak memandang tempat, waktu dan umur menjadi alasan-alasan yang perlu diperhatikan sehingga terbentuk dan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok untuk bisa mengatur dan mengontrol penggunaan rokok itu sendiri.

Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa tujuan dalam dibentuknya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dengan maksud agar mampu mengatur dan mengkondisikan penggunaan rokok yang semakin bertambah. Memang ada harapan terselubung bahwa penetapan ini agar penggunaan rokok bisa berkurang. Akan tetapi, hal ini diyakini pemerintah juga membutuhkan proses dan penyampaian yang baik kepada masyarakat. Dan perlu diketahui, penetapan peraturan daerah tersebut bukan melarang seseorang untuk merokok atau bahkan berhenti merokok, hanya saja perlu lebih memperhatikan kapan dan dimana ia bisa merokok. Sayangnya, hal ini belum berjalan secara maksimal, dimana masyarakat Lumajang masih banyak yang tidak tahu mengenai peraturan daerah tersebut, ada juga yang memang tidak menghiraukan peraturan tersebut, sehingga tujuan pemerintah untuk menciptakan Lumajang bebas rokok masih jauh dari harapan.

Jikalau ditinjau dari perspektif *Maqashid Syari'ah* maka tujuan dibentuknya Kawasan Tanpa Rokok sangat diperbolehkan. Hal ini dikarenakan agama Islam pada dasarnya mengharamkan penggunaan rokok itu sendiri. Apalagi fatwa MUI pada Sidang Ijtima' Ulama Fatwa III MUI

pada tanggal 24-26 Januari 2009 di Padang Panjang, Sumatera Barat yang menyebutkan peng-*haraman* rokok diperuntukkan kepada ibu hamil, anak-anak dan larangan merokok di tempat umum. *Maqashid Syari'ah* sendiri memiliki tujuan-tujuan yang terbagi dalam dua kategori yakni tujuan-tujuan hukum yang dimaksud oleh *syari'* (tuhan) serta tujuan-tujuan hukum yang berkaitan dengan tujuan dari para mukallaf. Mukallaf ialah orang-orang yang memiliki kewenangan hukum serta memiliki kewajiban dalam menjalankan hukum.¹¹⁵

Pada penjelasan sebelumnya telah diketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi lambatnya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok adalah karena faktor sosial dan budaya. Dimana sebagian masyarakat masih berpendapat bahwa rokok adalah obat. Bahkan sedang marak dimana para pemuda meracik dan membuat sebatang rokok sendiri dan diperjualbelikan. Hal ini sebenarnya telah terjadi pada zaman dahulu dan digunakan kembali pada saat ini. Meracik dan membuat rokok sendiri juga dinilai lebih murah, dan penggunaanya bisa mengatur seperti apa bentuk rokok yang diinginkan untuk digunakan. Karena hal inilah, pemerintah berupaya membentuk peraturan daerah agar masyarakat lain yang tidak merokok bisa semakin berhati-hati terhadap asap rokok, baik untuk kesehatan pribadi, orang lain

¹¹⁵ Achmad Abdul Jabbar, "Praktik Modifikasi Lampu Kabut di Klub Motor Kota Malang (Studi Perspektif Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Maqashid Syari'ah)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14969/>

hingga lingkungan. Karena menjadi hak dari tiap warga negara Indonesia dalam memperoleh udara bersih dan sehat. Jika melihat dari kaca mata *Maqashid Syari'ah*, hukum Islam memiliki tujuan dalam memperhatikan kemaslahatan umat. Islam mengharamkan apapun yang bentuk serta jenisnya ada untuk merusak hingga menghancurkan kemaslahatan umat. Maka dari itu, terdapat empat aspek yang digunakan dalam penetapan hukum, yakni:¹¹⁶

1. Tujuan syari' ketika menetapkan suatu hukum, yakni dengan memperhatikan bagaimana kemaslahatannya bagi umat untuk kehidupan dunia dan akhirat.
2. Tujuan syari' ketika menetapkan hukum agar dipahami dan berhubungan dengan segi kebahasaannya.
3. Tujuan syari' ketika menetapkan hukum sebagai bentuk pembebanan hukum (*taklif*) yang haruslah dilaksanakan.
4. Tujuan syari' ketika menetapkan hukum agar para mukallaf atau orang yang cakap hukum mampu ikut berkecimpung didalam hukum yang berhubungan dengan kepatuhan manusia atas hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Pemasangan tanda/plang 'dilarang merokok' telah ditemukan di beberapa tempat seperti di Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, Puskesmas Rogotruman Kecamatan Lumajang, MAN Lumajang, MTsN Lumajang, Gereja Kristus Tuhan Haleluyah Lumajang, Kantor Pemerintah Daerah

¹¹⁶ Ibid.

Kabupaten Lumajang dan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lumajang, dan SPBU Pertamina 54.673.12. Dari beberapa tempat yang disebutkan, sayangnya yang telah menjalankan dengan baik peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok hanyalah Puskesmas Rogotrungan Kecamatan Lumajang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Bahkan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang selaku rumah sakit besar dimana jelasnya terdapat banyak pasien didalamnya masih belum bisa menjalankan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut. Rumah Sakit seharusnya memperhatikan hal ini dengan jeli dan tegas, bagaimana dampak asap rokok bagi tamu/pasien yang ada. Setidaknya menyediakan tempat khusus yang disesuaikan juga dalam pasal dalam peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok agar tidak mengganggu para pasien/tamu yang tidak merokok, terutama ibu hamil dan anak-anak.

Maqashid Syari'ah pun memandang bahwa dalam hukum Islam sendiri memberikan banyak perhatian untuk melindungi hak-hak individu serta memberikan jaminan rasa aman pada kebutuhan hidup yang merupakan tujuan utama dari syari'at Islam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan agar memelihara kemaslahatan umat agar terhindar dari *mafsadat* atau bahkan gabungan dari keduanya. Tujuan ini dicapai melalui *taklif*, dan untuk melaksanakannya bergantung pada sumber hukum utamanya yakni Al Qur'an

serta Hadits. Para ulama ushul fiqh menyebutkan bahwa terdapat lima unsur yang perlu dipelihara serta diwujudkan, diantaranya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari kelima unsur tersebut, seorang mukallaf akan mendapatkan *maslahat* jikalau terlaksana dengan baik. Namun, menjadi *mafsadat* jikalau seorang mukallaf tidak dapat melaksanakan kelima aspek tersebut.

Ditinjau dari *Maqashid Syari'ah*, dibentuknya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok masuk dalam tingkatan ketiga yakni *maqashid al-tahsiniyyat* yakni tujuan hukum adalah menyempurnakan kehidupan manusia dengan melakukan hal yang baik dan benar menurut syara' serta adat dan kebiasaan. Selain itu, juga menjauhi hal yang buruk menurut akal sehat. Dalam *maqashid al-tahsiniyyat*, keperluan yang dibutuhkan erat adanya dengan usaha yang dikerahkan untuk menjaga perilaku serta tidak menyulitkan hingga merusak esensi dari kelima aspek tadi. Sehingga, bisa dikatakan bahwa *maqashid al-tahsiniyyat* memiliki sifat sebagai pelengkap kebutuhan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada responden dan menghasilkan berbagai hasil. Peneliti membagi kategori kawasan tanpa rokok sebagai berikut: *Pertama*, Seperti Puskesmas Rogotruran Kecamatan Lumajang, Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, Laboratorium Klinik Jenggolo Lumajang dan SPBU Pertamina 54.673.12 telah efektif menjalankan

poin penting dalam peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok; *Kedua*, Ada yang sedikit menjalankan poin penting pada peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok seperti MAN Lumajang, MTsN Lumajang, Masjid Al Huda Lumajang, Gereja Kristus Tuhan Haleluyah Lumajang, Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang; dan *Ketiga*, hampir tidak menjalankan poin penting dalam peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang. Dari kategori kedua dan ketiga, seperti penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kedua kategori tersebut. Dimana selain dikarenakan regulasi pemerintah belum tersampaikan kepada masyarakat serta sarana dan prasarana yang belum dilengkapi/diberikan kepada perokok di kawasan tanpa rokok berupa tempat khusus untuk merokok, faktor pertama sangat berpengaruh dalam keefektifan penggunaan kawasan tanpa rokok. Penggunaan rokok yang menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat Lumajang menjadi faktor utama penghambat berjalannya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok meskipun telah ada peraturan untuk mengatur dan mengkondisikan masyarakatnya.

Dasar dalam teori *Maqashid Syari'ah* ialah:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”

(QS. Al-Jatsiyah [45]:18)

Ayat ini menjelaskan bahwasanya agama Islam memiliki tujuan dalam menjalankan suatu hukum yakni untuk berbuat kebaikan serta melarang dalam melakukan kejahatan agar umat manusia terhindar dari sifat *fasiq*. Orang yang *fasiq* merupakan orang yang memiliki penyimpangan dari kebenaran yang ada karena berbuat kemaksiatan atau bahkan melakukan dosa besar seperti kejahatan.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa bila ditinjau dari *Maqashid Syari'ah*, pembentukan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok bertujuan baik untuk mampu menjaga masyarakat Lumajang agar bebas rokok minimal ketika aktivitas bekerja berlangsung. Dengan dibentuknya peraturan daerah ini menjadi harapan agar kedepannya kemaslahatan umat lebih optimal lagi terwujud.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan analisis dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok belum terlaksana dengan baik yang disebabkan karena kurang maksimalnya peran pemerintah, sosial budaya masyarakat serta sarana dan prasarana yang kurang mumpuni.
2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Maqashid Syari'ah* adalah adanya kawasan tanpa rokok masuk dalam tingkatan ketiga yakni *maqashid at tahsiniyyat* yakni pelengkap kebutuhan yang memiliki tujuan untuk menyempurnakan kehidupan manusia untuk melakukan kebaikan dan menghindari kejelekan menurut syara' serta adat kebiasaan.

B. Saran

Saran pada penelitian ini diharapkan dapat tersampaikan kepada:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang seharusnya semakin memperketat dalam memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya.

2. Seharusnya, masyarakat bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk mampu mewujudkan masyarakat yang tertib, sehat dan nyaman dalam melakukan kegiatan. Bila dirasa tidak mengetahui tentang adanya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, maka setidaknya dapat menaati peraturan/rambu tentang larangan merokok di kawasan tanpa rokok.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Undang-Undang

Al Qur'an Al Kariim

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan
Tanpa Rokok

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

Buku dan Jurnal

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta:
Rineka Cipta, 1998).

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II*, Cetakan 20. (Yogyakarta: Andi Offset,
1991).

Harun, Nurlaila. "Hukum Merokok Menurut Tinjauan Nash dan Kaidah Syar'iyah".
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2015 : 3.

<http://dx.doi.org/10.30984/as.v13i2.176>

Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

Ira Rachmani Achadiyah, Eddi Basuki Kurniawan dan Septiani Hariyani. “Kinerja dan Rute Pelayanan Angkutan Kota di Kawasan Perkotaan Lumajang-Kabupaten Lumajang”. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, No. 2 (2010) : 9.
<https://tatakota.ub.ac.id/index.php/tatakota/article/view/103/102>

Lidya Rahmadani Hasibuan dan Salman Paris Harahap. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan”. *Jurnal Hukum Responsif, Universitas Pembangunan Panca Budi*, 2019.
<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/494/466>

LKP2M. *Research Book For LKP2M*. (Malang: UIN, 2005).

Marzuki. *Metodologi Riset*. (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1986).

Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Surabaya: Prenadamedia Group, 2005).

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).

Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991).

Nancy Purnamasari Setiawan, Denny Hernawan dan Euis Salbiah. “Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

- pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Bogor)". *Jurnal Governisasi, Universitas Djuanda*, 2017.
- <https://doi.org/10.30997/jgs.v3i1.809>
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian Hukum, cetakan ketiga*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Saifullah, Muhammad Iqbal, dan Hartina. "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh Jawa Barat*, 2019.
- <http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i1.1901>
- Shidiq, Ghofar. "Teori *Maqashid al-Syari'ah* Dalam Hukum Islam". *Sultan Agung* Vol. XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009.
- <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>
- Suparmin, Sudirman. "Peran *Maqashid Syari'ah* dalam Kehidupan". *Al-Kaffah*, Vol.4, No.1, (2001): 3. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/2914>
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986).
- Soetjiningsih. *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. (Jakarta: Sagung Seto, 2010).
- Wirjosoegito, Soebono. *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).

Website

Adri Yassin, Beni. “Rokok itu Haram”. *Perpustakaan Universitas Andalas*, 9 Desember 2019, diakses 4 Mei 2021,

[https://pustaka.unand.ac.id/component/k2/item/215-rokok-itu-haram#:~:text=\(QS.%20Al%20Baqarah%3A%20195,jelas%20rokok%20terlarang%20atau%20haram.](https://pustaka.unand.ac.id/component/k2/item/215-rokok-itu-haram#:~:text=(QS.%20Al%20Baqarah%3A%20195,jelas%20rokok%20terlarang%20atau%20haram.)

Anonim. “Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan”. Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 5. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/>

Anonim. “Keadaan Wilayah Kabupaten Lumajang”. *Kabupaten Lumajang*, diakses 4 April 2021. <https://lumajangkab.go.id/main/gambaran>

Anonim. “Visi Misi”. *Kabupaten Lumajang*, diakses 5 April 2021, <https://lumajangkab.go.id/main/visi-misi>

Anonim. “Beranda”. *RS. Bhayangkara Lumajang*, diakses 5 April 2021, <http://www.rumkitbhayangkaralumajang.com/>

Anonim. “Profil Lembaga”. *MAN Lumajang*, diakses 6 April 2021, <https://manlumajang.sch.id/profil/>

Anonim. “Visi Misi”. *MTs NEGERI 1 LUMAJANG The Islamic Culture School*, diakses 6 April 2021, <http://mtsn1lumajang.sch.id/visi-misi/>

Anonim. “Profil Sekolah”. *SD Islam Tompokersan Lumajang*, diakses 6 April 2021, <https://www.sditompokersan.sch.id/profil-sekolah/>

- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang. “Beranda”. *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*, diakses 8 April 2021, <https://bakesbangpol.lumajangkab.go.id/>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang. “Profil”. *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*, diakses 8 April 2021. <https://bakesbangpol.lumajangkab.go.id>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang. “Beranda”. *Dinas Kesehatan*, diakses 8 April 2021. <https://dinkes.lumajangkab.go.id/>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang. “Profil”. *Dinas Kesehatan*, diakses 8 April 2021. <https://dinkes.lumajangkab.go.id/>
- Gayatri, Rosalia Retno. “Visi Misi Puskesmas Rogotruran”. *Puskesmas Rogotruran Kabupaten Lumajang*, diakses 5 April 2021, <http://www.puskesmasrogotruran.or.id/p/visi-terwujudnya-masyarakat-kecamatan.html>
- Hukumonline. “Merokok Dinilai Bukan Bagian dari HAM”. *Hukumonline.com*. 06 Januari 2011, diakses 21 Oktober 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d2515c41772e/merokok-dinilai-bukan-bagian-dari-ham-/>
- Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. “Sarana Perhubungan”. *Kabupaten Lumajang*, diakses 11 April 2021, <https://lumajangkab.go.id/fasum/index/perhubungan/terminal#>

- Rizqi, Firdha. “Pendiri Lumajang; Banyak Wide, Arya Wiraraja atau Menak Koncar”. *Lontar Madura*, 03 November 2013, diakses 11 April 2021, <https://www.lontarmadura.com/pendiri-lumajang-banyak-wide-arya-wiraraja-atau-menak-koncar/>
- Sentral FM Lumajang. “Pemprov Jatim Ambil Alih Pengelolaan Terminal Minak Koncar Lumajang”. *Suarasurabaya.net*, 12 Oktober 2016, diakses 11 April 2021, [https://www.suarasurabaya.net/jaring-radio/2016/Pemprov-Jatim-Ambil-Alih-Pengelolaan-Terminal-Minak-](https://www.suarasurabaya.net/jaring-radio/2016/Pemprov-Jatim-Ambil-Alih-Pengelolaan-Terminal-Minak-Koncar-Lumajang)
- Syarifah, Fitri. “Benarkah Merokok Itu Hak Asasi Manusia?”. *Liputan6*, 27 Agustus 2014, diakses 6 Desember 2020, <https://www.liputan6.com/health/read/2096872/benarkah-merokok-itu-hak-asasi-manusia>
- Wamad, Sudirman. “Sopir Diduga Merokok Usai Isi Bensin Minibus Terbakar di SPBU Indramayu”. *detiknews*, 18 Desember 2019, diakses 3 Mei 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4827381/sopir-diduga-merokok-usai-isi-bensin-minibus-terbakar-di-spbu-indramayu>
- Wikipedia. “Terminal Minak Koncar”. *Wikipedia*, 29 Desember 2020, diakses 3 Mei 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal_Minak_Koncar#cite_note-:0-7

Skripsi/Thesis

Abdul Jabbar, Achmad. “Praktik Modifikasi Lampu Kabut di Klub Motor Kota Malang (Studi Perspektif Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Maqashid Syari’ah)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/14969/>

Ambar Wati, Ade Retsy. “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014”, Undergraduate thesis, Universitas Lampung, 2017.

<https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/582213#:~:text=Penerapan%20Kawasan%20Tanpa%20Rokok%20merupakan,dinyatakan%20dilarang%20untuk%20kegiatan%20merokok.>

Lathifah, Amalia. “Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30526/1/13370060_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Media, Via. “Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur dan Korelasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta”, Undergraduate Thesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

http://eprints.undip.ac.id/17589/1/Via_Media

Rismawan, Novika. “Kerjasama Pengelolaan Buah Swalayan di Desa Manunggal Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/244/7/08220040>

Sikana Akbar, Arina Manna. “Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019 Persepektif *Maslahah Mursalah*”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/21103/7/15230010/>

Surjaka, Andreas. “Pengaruh Kadar Campuran Bahan Bakar Pada Efisiensi Motor Bensin”, Undergraduate thesis, Universitas Gadjah Mada, 1989.

<https://repository.ugm.ac.id/135774/>

LAMPIRAN GAMBAR



Dokumentasi wawancara dengan Satpam Rumah Sakit Bhayangkara



Dokumentasi wawancara dengan Tukang Bersih *Play Ground* Alun-alun Lumajang



Dokumentasi wawancara dengan Satpam MAN Lumajang



Dokumentasi wawancara dengan salah satu guru MTsN Lumajang